

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN PINRANG



2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN PINRANG



2019

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG 2019

Katalog : 4102004.7315

No. Publikasi : 73150.1927

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25,0 cm

Halaman : xxiv + 81

Pembina : Kepala BPS Kabupaten Pinrang

Tim Penyusun : Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Pinrang

Grafik Kulit : Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Pinrang

Layout : Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Pinrang

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://pinrangkab.bps.go.id>

ORGANISASI PENULISAN

Penanggung Jawab

H. Muhammad Asri Lantong, SE

Editor

Sunarti, S.Si

Penulis

Ekwinda Linggar Surya Kusuma, S.Si

Pengolah Data

Ekwinda Linggar Surya Kusuma, S.Si

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Pinrang tahun 2019 memuat berbagai indikator antara lain, indikator kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan indikator-indikator lainnya.

Publikasi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen BPS akan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Pinrang tahun 2018. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Terima kasih kepada pihak yang membantu terbitnya publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan.

Pinrang, Oktober 2019

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang
Kepala,



H. Muhammad Asri Lantong, S.E

NIP. 19661121 199301 1 001

<https://pinrangkab.bps.go.id>



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xvi
Singkatan dan Anonim	xvii
Istilah Teknis	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Ruang Lingkup	2
1.2 Sumber Data	2
1.3 Sistematika Penulisan	2
BAB II	
KEPENDUDUKAN	7
2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	8
2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	8
2.3 Persebaran dan Komposisi Penduduk	9
2.4 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	11
2.5 Angka Beban Ketergantungan	13
BAB III	
KELUARGA BERENCANA	17
3.1 Status Perkawinan	17
3.2 Usia Perkawinan Pertama	19
3.3 Pemakaian Cara/Alat KB	21

BAB IV	
PENDIDIKAN	29
4.1 Angka Melek Huruf	29
4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	30
4.3 Tingkat Partisipasi Sekolah	32
BAB V	
KESEHATAN	39
5.1 Angka Kesakitan/Morbiditas	39
5.2 Penolong Persalinan	42
BAB VI	
KETENAGAKERJAAN	47
6.1 Konsep Ketenagakerjaan	47
6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	49
6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	51
6.4 Bekerja	53
6.5 Jumlah Jam Kerja	54
BAB VII	
FASILITAS PERUMAHAN	59
7.1 Kualitas Rumah Tinggal	59
7.1.1 Jenis Dinding Rumah	59
7.1.2 Jenis Atap	60
7.1.3 Jenis dan Luas Lantai	61
7.2 Fasilitas Rumah	64
7.2.1 Air Minum Bersih	64
7.2.2 Sumber Penerangan Listrik	66
7.2.3 Tempat Pembuangan Tinja	67
7.3 Status Kepemilikan Rumah	68

BAB VIII	
KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN	73
8.1 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan	74
8.2 Penduduk Miskin	76
DAFTAR PUSTAKA	81

<https://pinrangkab.bps.go.id>

<https://pinrangkab.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2018	8
Tabel 2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2017-2018	10
Tabel 3. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2017-2018	13
Tabel 4. Persentase Ijazah/STTB yang Dimiliki Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, 2018	32
Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2018	33
Tabel 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	34
Tabel 7. TPAK Kabupaten Pinrang menurut Wilayah dan Jenis Kelamin tahun 2017-2018	50
Tabel 8. TPT Kabupaten Pinrang menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2018	52
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah tahun 2018	63
Tabel 10. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah per Kapita tahun 2018	64
Tabel 11. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah) menurut Kelompok Barang, Maret 2018	75
Tabel 12. Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2013-2018	77
Tabel 13. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2013-2018	79

<https://pinrangkab.bps.go.id>



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang 2014-2018.....	9
Grafik 2. Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2018	12
Grafik 3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2018	18
Grafik 4. Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Hamil menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pinrang tahun 2018 ...	20
Grafik 5. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Partisipasi KB, 2018	22
Grafik 6. Persentase Pemakaian Alat/Cara KB Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun, 2018	23
Grafik 7. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pinrang, 2018	30
Grafik 8. Persentase Ijazah/STTB yang Dimiliki Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, 2018	31
Grafik 9. Persentase Keluhan Kesehatan yang Diderita selama Sebulan Terakhir, 2018	40
Grafik 10. Persentase Keluhan Kesehatan yang Diderita selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2018	41
Grafik 11. Persentase Penduduk yang Menderita Gangguan Kesehatan Sebulan yang Lalu menurut Lamanya Hari Gangguan Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2018	42
Grafik 12. Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2018 ...	43
Grafik 13. Persentase Balita menurut Tenaga Medis Penolong Kelahiran Terakhir, 2018	44
Grafik 14. Diagram Ketenagakerjaan, BPS	48
Grafik 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, 2018	49

Grafik 16. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang termasuk Angkatan Kerja, 2018	51
Grafik 17. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama	54
Grafik 18. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jam Kerja selama Seminggu, 2018	55
Grafik 19. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas, 2018	60
Grafik 20. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas, 2018.....	61
Grafik 21. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas, 2018 ..	62
Grafik 22. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Air Minum	65
Grafik 23. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air untuk Memasak, 2018	66
Grafik 24. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Listrik, 2018	66
Grafik 25. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018	68
Grafik 26. Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2018	69
Grafik 27. Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Penduduk Kabupaten Pinrang, 2015-2018 ..	74
Grafik 28. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang tahun 2013-2018	78



SINGKATAN DAN AKRONIM

AHH	Angka Harapan Hidup
AKB	Angka Kematian Bayi
API	<i>Annual Paracite Incidence</i>
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
Asabri	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASI	Air Susu Ibu
Askes	Asuransi Kesehatan
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BB/TB	Berat Badan Menurut Tinggi Badan
BB/U	Berat Badan Menurut Umur
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
CDR	<i>Case Detection Rate</i>
CNR	<i>Case Notification Rate</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus
DTPK	Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
IKG	Indeks Kesulitan Geografis
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KB	Keluarga Berencana
KLB	Kejadian Luar Biasa
PBI	Penerima Bantuan Iuran
Polindes	Pondok Bersalin Desa
Poskesdes	Pos Kesehatan Desa

PSG	Pemantauan Status Gizi
PTM	Penyakit Tidak Menular
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
Renstra	Rencana Strategi
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TB	Tuberkulosis
TB/U	Tinggi Badan Menurut Umur
TFR	<i>Total Fertility Rate</i> (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

ISTILAH TEKNIS

	Definisi
Rumah Tangga Biasa	Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.
Kepadatan Penduduk	Rata-rata banyaknya penduduk per km ²
Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dengan menggunakan rumus eksponensial.
Rasio Jenis Kelamin	Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan dikali 100.
Kawin	Mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
Cerai Hidup	Berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena bekerja.
Cerai Mati	Ditinggal mati oleh suami/istrinya dan belum kawin lagi.
Metode Kontrasepsi	Alat/cara pencegah kehamilan.

Angka Kematian Bayi (AKB)	Besarnya probabilitas bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan per seribu kelahiran).
Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.
Sekolah	Kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi termasuk pendidikan yang disamakan.
Tidak atau Belum Pernah Sekolah	Tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.
Masih Bersekolah	Sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.
Tidak Sekolah Lagi	Pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
Melek Huruf	Penduduk 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.
Angka Buta Huruf	Ukuran persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis.
Angka Partisipasi Sekolah	Partisipasi penduduk usia tertentu yang masih sekolah atau jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut.
Keluhan Kesehatan	Keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan

	walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
Penduduk Usia Kerja	Penduduk yang berumur 10 tahun ke atas.
Angkatan Kerja	Penduduk usia 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti, dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.
Bukan Angkatan Kerja	Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang seminggu lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori bekerja/mencari pekerjaan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Perbandingan antara penduduk usia 10 tahun ke atas (usia kerja) dengan angkatan kerja.
Pengangguran	Penduduk yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia di bawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan

	penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.
--	---

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat

merupakan indikator sosial ekonomi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tingkat keberhasilan pembangunan



**SUMBER
DATA**

SUSENAS

SAKERNAS

**PROYEKSI
PENDUDUK**

<https://pinrangkab.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan mempunyai makna yang luas, tidak hanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan tetapi juga menyangkut pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup bahkan rasa aman. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Diperlukan indikator-indikator lain seperti banyaknya penduduk yang bersekolah, tingkat kesehatan masyarakat, dan tingkat kemiskinan untuk mendapatkan grafik kesejahteraan secara umum.

Ketersediaan data-data terkait sosial dan ekonomi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembangunan telah dicapai pemerintah suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan statistik dasar. Statistik dasar adalah menyediakan data-data sosial maupun ekonomi melalui berbagai survei dan sensus. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibukukan menjadi beragam publikasi, salah satunya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra).

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat menyajikan berbagai indikator dasar yang terkait dengan kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran konsumsi. Data-data yang ditampilkan merupakan hasil dari survei-survei BPS, diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018.

Publikasi ini diterbitkan sebagai upaya mengantisipasi berbagai kebutuhan data tentang kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang, yang dapat dijadikan sebagai

bahan informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data yang disajikan dalam publikasi ini dipilih sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi mengenai taraf hidup dan perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang.

1.1 Ruang Lingkup

Publikasi ini secara umum menjelaskan indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang tahun 2018. Namun demikian untuk beberapa indikator disajikan menurut kategori tertentu dan untuk mengetahui perkembangannya, dilakukan perbandingan dengan menampilkan data pada beberapa tahun sebelumnya.

1.2 Sumber Data

Sumber data utama untuk penyusunan publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret tahun 2018 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus tahun 2018. Diantara beberapa survei yang dilaksanakan oleh BPS, Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial, ekonomi, dan kependudukan yang paling luas. Indikator yang terkumpul dari hasil Susenas antara lain meliputi bidang pendidikan, partisipasi keluarga berencana (KB), kesehatan, perumahan, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Data Susenas dan Sakernas menyajikan informasi mengenai tingkat kesejahteraan rakyat berupa data indikator tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, persentase peserta KB aktif, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih, dan juga rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk konsumsi makanan dan non makanan.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2019 tersusun dalam delapan bab. Bab satu sebagai pendahuluan yang mencakup ruang lingkup

penulisan, sumber data, dan sistematika penulisan. Bab dua membahas tentang kependudukan, yaitu mengenai jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi umur dan jenis kelamin, serta angka beban ketergantungan.

Pada bab ketiga akan membahas tentang status perkawinan, angka perkawinan pertama, fertilitas, pemakaian alat/cara KB. Selanjutnya pada bab empat membahas tentang kondisi pendidikan yang mencakup angka melek huruf, partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan juga rasio murid-guru serta rasio murid-sekolah.

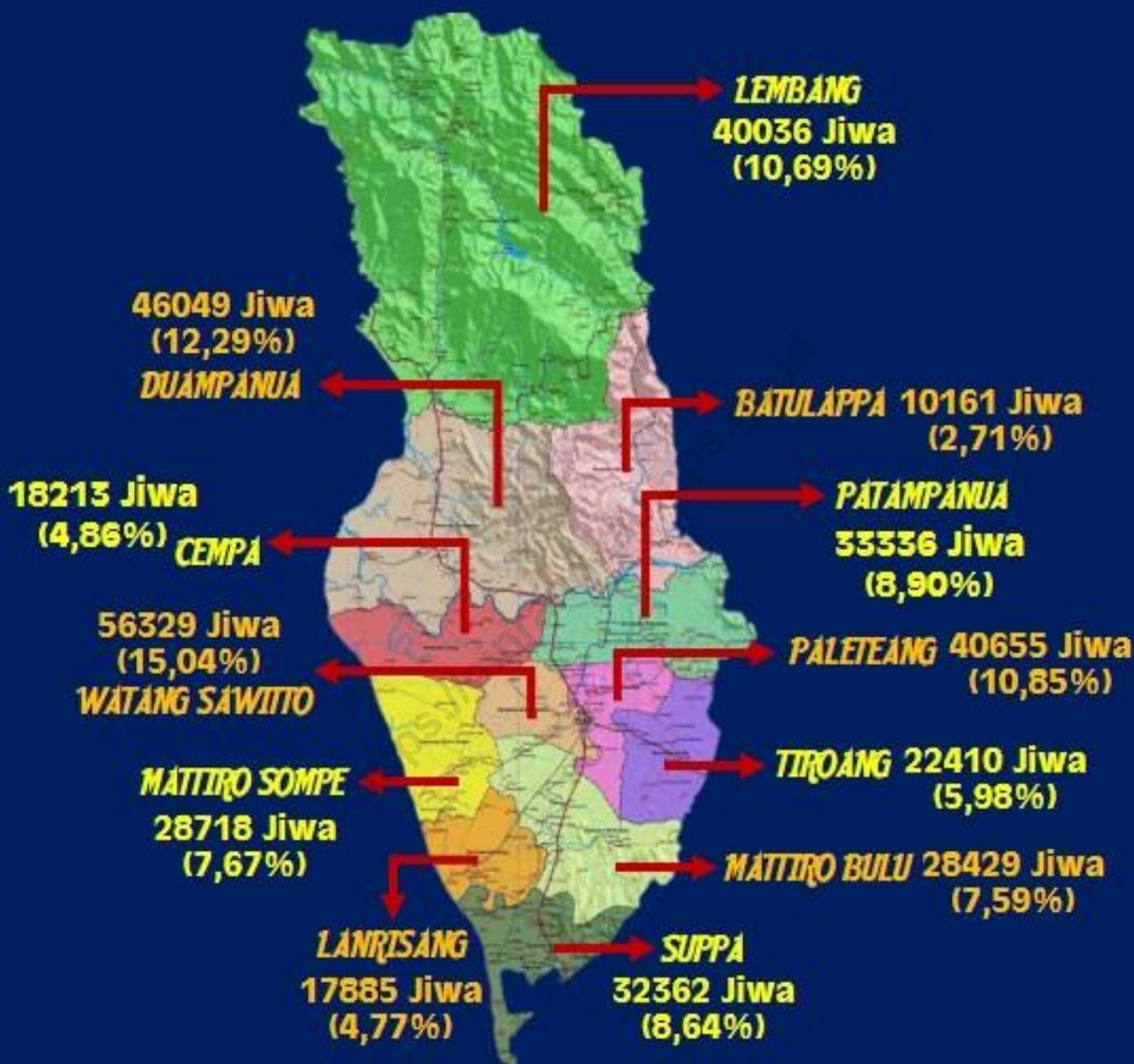
Kemudian pada bab lima menyajikan tentang kesehatan masyarakat sebagai salah satu masalah sosial mencakup angka kesakitan, lama hari sakit, angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir, penolong persalinan, serta fasilitas layanan kesehatan dan tenaga medis. Selanjutnya di bab keenam menyajikan tentang kondisi ketenagakerjaan yang mencakup partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, lama jam kerja, serta lapangan usaha utama bagi penduduk yang bekerja.

Tingkat sosial yang berkaitan dengan kondisi perumahan dan penguasaan tempat tinggal disajikan dalam bab tujuh. Pokok bahasan yang ada pada bab tujuh antara lain mengenai kualitas rumah tempat tinggal, fasilitas perumahan, dan status kepemilikan rumah. Pada bab terakhir yaitu bab delapan menyajikan tentang kondisi ekonomi rumah tangga dengan cakupan pengeluaran konsumsi rumah tangga serta kondisi penduduk miskin.

Semua indikator tersebut akan diulas serta dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga memudahkan para konsumen data dalam memahami kondisi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Pinrang.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN



374583 Jiwa



181811 Jiwa

48,54%



192722 Jiwa

51,46%

SR = 94,31

setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 sampai 95 penduduk laki-laki.

<https://pinrangkab.bps.go.id>



BAB II KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Namun di sisi lain, penduduk juga merupakan beban untuk mencapai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baik sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar sementara pendapatan regional di wilayah tersebut relatif kecil akan mengakibatkan pendapatan per kapita wilayah tersebut rendah.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta kesejahteraan masyarakat yang rendah akan mendorong munculnya permasalahan-permasalahan sosial. Ketimpangan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan merupakan beberapa faktor yang dapat memicu tindak kriminalitas.

Permasalahan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, baik sosial maupun ekonomi. Penanganan permasalahan juga membutuhkan koordinasi lintas sektoral agar penyelesaian yang komprehensif dapat tercapai. Mengingat pentingnya aspek penduduk dalam pembangunan, maka diperlukan dukungan data-data kependudukan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Bab ini akan membahas berbagai indikator dasar kependudukan yang meliputi jumlah dan laju

pertumbuhan penduduk, persebaran dan komposisi penduduk, serta angka beban ketergantungan.

2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tercatat sebesar 374.583 jiwa dengan rincian laki-laki 181.811 jiwa dan perempuan 192.772 jiwa. Rasio jenis kelamin 94,31 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 sampai 95 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan proporsi penduduk laki-laki terhadap perempuan yang semakin meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2018 (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
2014	364.087	94,07
2015	366.789	94,11
2016	369.595	94,24
2017	372.230	94,23
2018	374.583	94,31

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Pinrang 2010 – 2020

2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi di suatu daerah. Indikator ini sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, dapat diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut di berbagai bidang. Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk masih harus dilengkapi dengan berbagai macam karakteristik penduduknya agar dapat dipergunakan secara tepat sasaran.



Grafik 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2018

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang dihitung dengan menggunakan metode Geometrik, dan tahun dasarnya adalah jumlah penduduk tahun 2010. Tahun 2018, diperoleh angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang sebesar 0,63 persen. Hal ini bermakna setiap tahun antara tahun 2010 dan tahun 2018 rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang per tahun adalah sebesar 0,63 persen dari tahun dasarnya.

2.3 Persebaran dan Komposisi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Pinrang. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk berada di wilayah perkotaan. Hal ini dipicu oleh keinginan masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Pinrang. Persebaran penduduk terpusat di ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Watang Sawitto serta wilayah sekitarnya, seperti Paleteang dan Tiroang.

Tabel 2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pinrang menurut Kecamatan Tahun 2017-2018

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	2017		2018	
		Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suppa	74,2	32.159	433	32.362	436
Mattiro Sompe	96,99	28.540	294	28.718	296
Lanrisang	73,01	17.775	243	17.885	245
Mattiro Bulu	132,49	28.251	213	28.429	215
Watang Sawitto	58,97	55.972	949	56.329	955
Paletang	37,29	40.397	1083	40.655	1090
Tiroang	77,73	22.269	286	22.410	288
Patampanua	136,85	33.126	242	33.336	244
Cempa	90,3	18.097	200	18.213	202
Duampanua	291,86	45.761	157	46.049	158
Batulappa	158,99	10.098	64	10.161	64
Lembang	733,09	39.785	54	40.036	55
Pinrang	1961,77	372.230	190	374.583	191

Sumber : Kabupaten Pinrang dalam Angka, 2017-2018

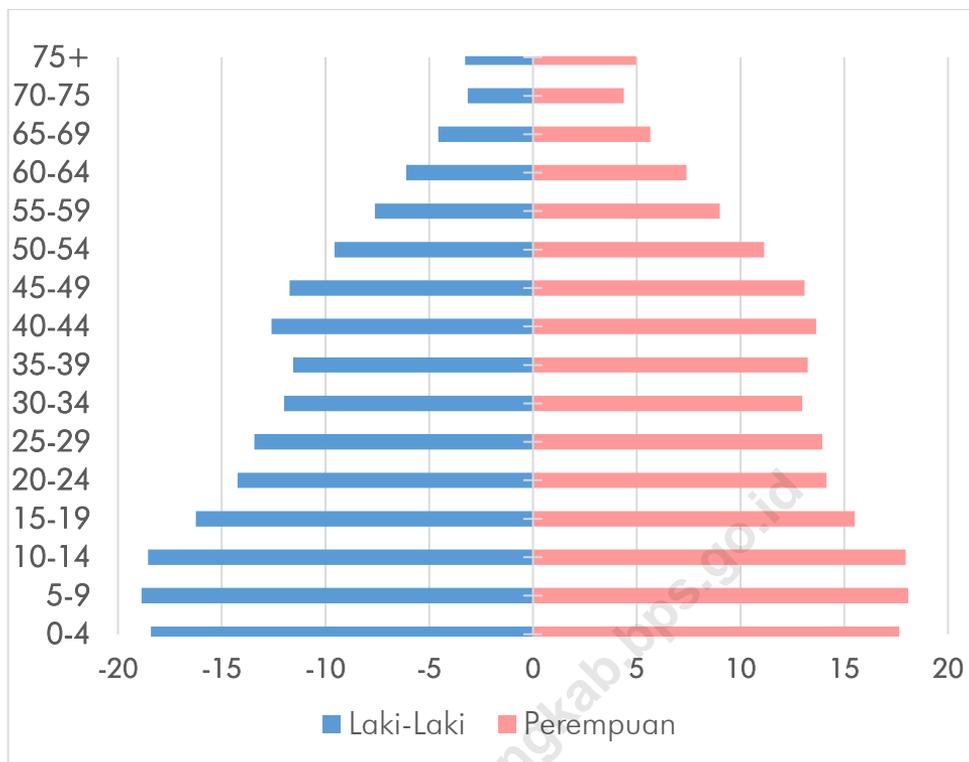
Tahun 2018, kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Pinrang adalah 191 jiwa per km². Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 191 jiwa di tiap km² luas wilayah Kabupaten Pinrang. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Lembang. Meskipun merupakan kecamatan yang terluas dan memiliki potensi perkebunan, namun secara geografis Kecamatan Lembang terdiri atas daerah pegunungan dengan infrastruktur yang belum memadai,

sehingga banyak penduduk yang memilih menetap di daerah lain dibandingkan Lembang.

2.4 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut kelompok umur bagi suatu wilayah berguna untuk melihat keterkaitan masalah kependudukan dengan masalah biologis, ekonomi, maupun sosial. Salah satu komposisi penduduk yang utama adalah komposisi menurut umur dan jenis kelamin. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui struktur umur penduduk. Seperti halnya laju pertumbuhan penduduk, struktur umur penduduk juga dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas (termasuk mortalitas bayi), dan migrasi.

Bila fertilitas meningkat, jumlah penduduk usia muda (0-4 tahun) pun akan meningkat. Sedangkan bila mortalitas pada suatu kelompok umur meningkat maka penduduk pada kelompok umur tersebut akan berkurang. Pengaruh migrasi terhadap struktur umur biasanya terjadi pada kelompok umur dewasa (produktif) karena faktor migrasi sebagian besar ditentukan oleh aspek ekonomi. Berikut ini disajikan piramida penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2018.



Grafik 2. Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2018

Piramida penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2018 termasuk jenis piramida penduduk muda (expansive). Bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga menunjukkan tingkat fertilitas yang relatif tinggi dan mortalitas yang rendah. Yaitu memiliki bentuk yang lebar pada kelompok umur 0-19 tahun, sedangkan pada usia tua sangat sedikit.

Balok piramida yang memanjang pada kelompok umur 0-4 tahun menunjukkan fertilitas yang tinggi. Balok piramida yang memendek pada kelompok umur 15-19 tahun dan kelompok umur di atasnya mengindikasikan adanya migrasi penduduk keluar dari Kabupaten Pinrang untuk berbagai alasan, misalnya melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, maupun perkawinan. Bentuk balok piramida semakin memendek pada kelompok umur 35-39 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar semakin besar. Pada kelompok

Umur 40-44 tahun, balok piramida terlihat memanjang yang mengindikasikan adanya migrasi masuk ke Kabupaten Pinrang. Migrasi masuk ini umumnya adalah penduduk yang kembali dari perantauan dengan berbagai alasan, misalnya ingin mengurus orang tua atau mereka tidak dapat lagi bekerja di perantauan karena usia yang semakin tua. Sementara itu, tingkat mortalitas yang tinggi terlihat dari bentuk balok piramida yang semakin mengecil dari kelompok umur 50-75+ tahun.

2.5 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (ABT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif disebut juga angkatan kerja yang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebaliknya penduduk usia non produktif adalah bukan angkatan kerja yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ABT dapat menjadi indikator kasar kondisi ekonomi suatu wilayah.

Tabel 3. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2018

Kelompok Umur	2017			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	15,03	14,47	29,50	14,90	14,34	29,24
15-64	30,62	33,08	63,69	30,71	33,13	63,83
65+	2,86	3,94	6,81	2,93	4,00	6,93
ABT Muda	49,10	43,74	46,32	48,53	43,28	45,80
ABT Tua	9,36	11,91	10,68	9,54	12,08	10,86
ABT	58,46	55,66	57,00	58,07	55,36	56,66

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020 (diolah)

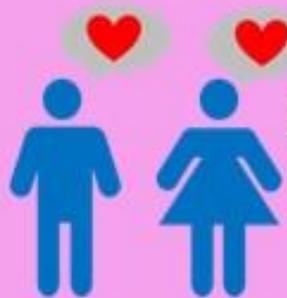
Semakin tinggi ABT, semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, begitu juga sebaliknya. ABT sebesar 56,66 persen pada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk umur produktif menanggung 56 sampai 57 penduduk umur tidak produktif. Nilai ABT Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan tabel di atas, ABT Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu peningkatan proporsi penduduk usia produktif dan penurunan proporsi penduduk usia non produktif (kelompok 0-14 tahun) pada tahun 2018. Penurunan ABT tentu menjadi sinyal yang baik bagi pemerintah karena menunjukkan penurunan beban ekonomi. Peningkatan proporsi penduduk usia produktif dari 63,69 persen pada tahun 2017 menjadi 63,83 persen pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang potensial sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Pinrang. Di sisi lain, keberhasilan pengendalian angka kelahiran juga akan mendorong terhadap penurunan ABT dengan mengurangi proporsi penduduk muda yang belum produktif.

Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelaminnya, terlihat bahwa ABT laki-laki pada usia 0-14 tahun (ABT Muda) lebih tinggi dibandingkan perempuan, baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk laki-laki di usia muda lebih besar daripada perempuan sedangkan pada saat usia produktif cenderung menurun, baik karena migrasi maupun kematian. Sementara itu, pada usia 65 tahun ke atas nilai ABT (ABT Tua) untuk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh usia harapan hidup perempuan yang lebih panjang daripada laki-laki.

Status Perkawinan

Penduduk Usia 10 tahun ke atas



BELUM KAWIN

34,89%



KAWIN

54,67%

CERAI HIDUP

2,61%



CERAI MATI

7,83%

Usia Perkawinan Pertama



17,38%

< 17
Tahun



20,99%

17 - 18
Tahun



22,13%

19 - 20
Tahun



39,50%

> 20
Tahun

Terlalu Muda,
Mental dan Sistem Reproduksi belum siap...

<https://pinrangkab.bps.go.id>

BAB III

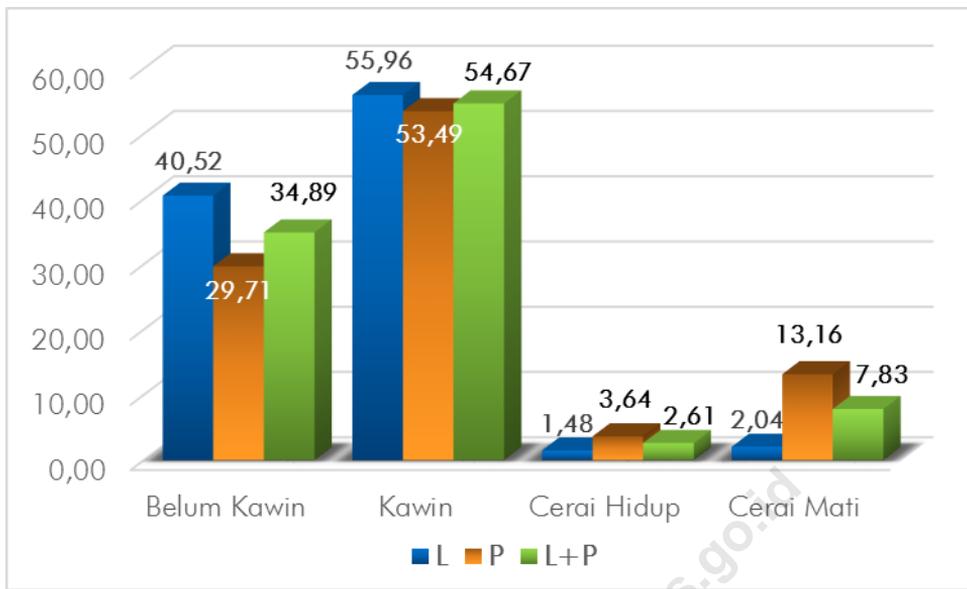
KELUARGA BERENCANA

Undang-Undang N0. 52 Tahun 2009 menekankan bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran bayi melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Selain itu, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1, pemerintah menetapkan umur minimum perkawinan pada perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun.

3.1 Status Perkawinan

Konsep perkawinan yang digunakan dalam pengumpulan data demografi BPS lebih difokuskan pada kondisi dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama untuk waktu yang lama, baik yang dilakukan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang (de Jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de Facto). Hal ini dilakukan terutama untuk memperoleh pendekatan yang lebih tepat mengenai keterkaitan antara status perkawinan dengan tingkat fertilitas yang sangat dipengaruhi oleh lamanya ikatan perkawinan.



Grafik 3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2018

Menurut status perkawinannya, penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2018 yang berstatus kawin sebanyak 54,67 persen; belum kawin 34,89 persen; cerai hidup 2,61 persen; dan cerai mati 7,83 persen. Persentase penduduk Kabupaten Pinrang yang berstatus kawin untuk laki-laki adalah 55,96 persen, lebih besar dibandingkan persentase perempuan yaitu 53,49 persen. Demikian pula untuk penduduk yang belum kawin, persentase penduduk laki-laki belum kawin (40,52 persen) lebih besar dibanding perempuan belum kawin (29,71 persen). Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar dibanding penduduk laki-laki dengan status sama.

Persentase penduduk perempuan berstatus cerai mati dan cerai hidup lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sedangkan untuk yang berstatus kawin, persentase laki-laki kawin lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan fenomena bahwa laki-laki yang telah cerai hidup ataupun cerai mati, tidak berselang lama kemudian menikah kembali sedangkan perempuan lebih banyak yang mempertahankan status jandanya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati.

Fenomena lain yang tampak dari data diatas adalah perempuan lebih cepat menikah dari pada laki-laki yang ditunjukkan oleh persentase perempuan berstatus belum kawin lebih kecil dibandingkan laki-laki.

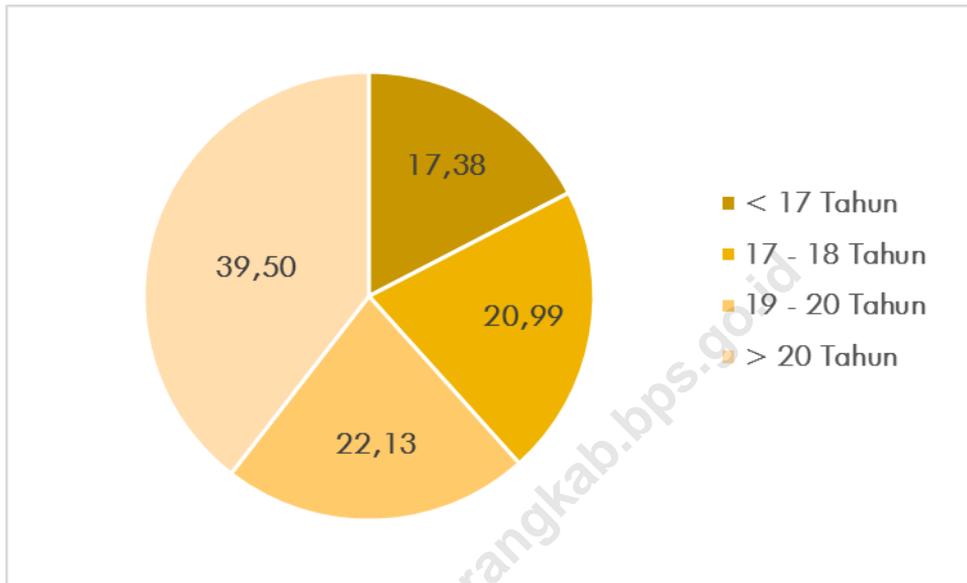
3.2 Usia Perkawinan Pertama

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat fertilitas yang erat kaitannya dengan umur perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama sebagai umur pertama kali menikah menandakan dimulainya masa reproduksi, karena tentunya kehamilan akan terjadi setelah perkawinan. Terdapat pengaruh antara umur perkawinan pertama dengan tingkat fertilitas. Semakin muda umur perkawinan pertama seorang perempuan, maka semakin tinggi pula fertilitas perempuan tersebut karena masa konsepsi yang semakin panjang.

Indikator umur kehamilan pertama pada perempuan penting bagi penentuan kebijakan yang terkait kependudukan terutama untuk program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Kehamilan pada umur terlalu muda akan berdampak pada kualitas keluarga serta resiko kesehatan dalam kehamilan dan persalinan. Data mengenai jumlah pasangan usia subur (persentase perempuan usia subur yang menikah) juga akan memudahkan perencanaan program KB untuk mempersiapkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

Sebagian besar perempuan yang pernah hamil di Kabupaten Pinrang dengan perkawinan pertama kali umur diatas 20 tahun yaitu sebanyak 39,50 persen. Selanjutnya, persentase perempuan di Kabupaten Pinrang yang pernah hamil dan umur perkawinan pertama kalinya pada umur 19 sampai 20 tahun yaitu 22,13 persen, kemudian umur 17-18 tahun adalah 20,99 persen. Fenomena perkawinan di bawah umur (kurang dari 17 tahun) masih terjadi di Kabupaten Pinrang. Sebesar 17,38 persen perempuan yang pernah hamil, dengan perkawinan pertama kali pada umur 16 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang digalakkan pemerintah masih belum ditaati sepenuhnya baik oleh masyarakat maupun oleh

instansi penyelenggara perkawinan. Sehingga diperlukan penyuluhan yang lebih intensif serta kesadaran masyarakat itu akan pentingnya ditetapkan batasan umur tersebut.



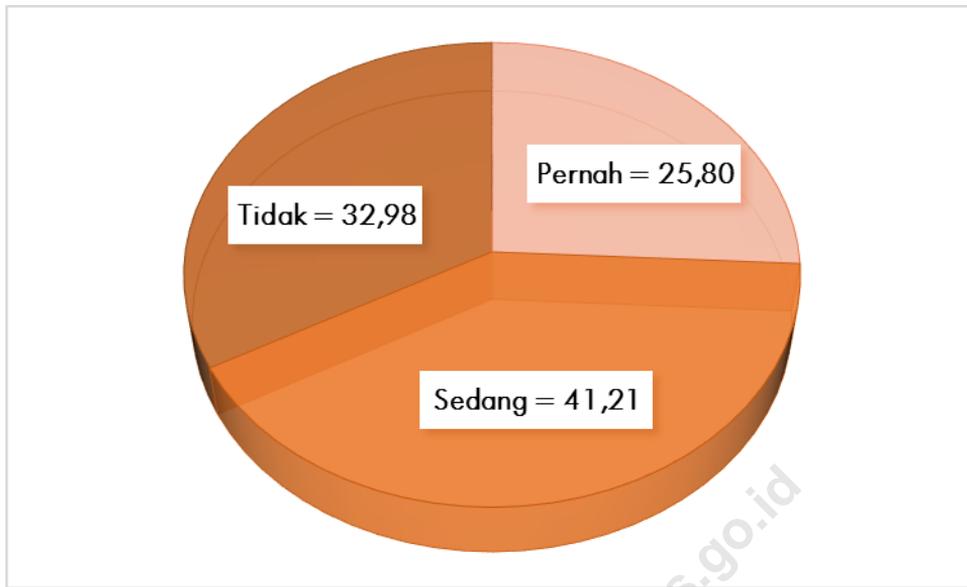
Grafik 4. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil menurut Umur Perkawinan Pertama di Pinrang Tahun 2018

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia minimal perempuan untuk menikah adalah 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal bagi perempuan untuk menikah adalah 21-25 tahun. Perkawinan pada rentang usia ini, lebih baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun mental. Pada usia tersebut, organ-organ reproduksi perempuan dianggap lebih siap untuk menghadapi resiko persalinan, serta lebih siap mental untuk merawat dan membesarkan anaknya tersebut.

3.3 Pemakaian Alat/Cara KB

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dilakukan dengan cara menekan angka fertilitas melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya pengaturan jarak kehamilan dan pengendalian jumlah kelahiran dengan menggunakan alat/cara kontrasepsi. Alat/cara kontrasepsi dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, di Indonesia mayoritas pengguna alat/cara kontrasepsi mayoritas adalah perempuan.

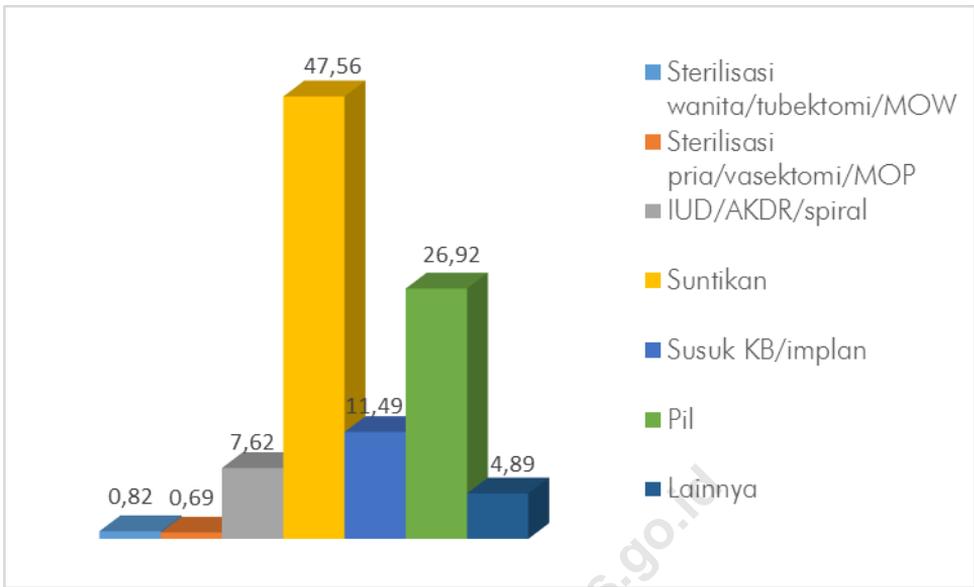
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi pada saat pencacahan dibandingkan dengan seluruh PUS di suatu wilayah. Informasi tentang besarnya prevalensi KB sangat bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan serta penyediaan pelayanan KB baik dalam bentuk mempersiapkan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.



Grafik 5. Persentase penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut partisipasi KB, 2018

Mayoritas wanita pernah kawin (WPK) di Kabupaten Pinrang pernah dan sedang menggunakan alat kontrasepsi (67,02 persen), sementara sisanya yaitu 32,98 persen tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas PUS di Kabupaten Pinrang menyadari akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan maupun membatasi jumlah kelahiran. Sebanyak 41,21 persen WPK menggunakan alat kontrasepsi hingga saat ini.

Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 adalah 41,21 persen. Hal ini berarti sekitar 41 sampai 42 dari 100 PUS menggunakan alat kontrasepsi. Alasan WPK yang sedang tidak ber-KB diantaranya karena telah menginjak masa menopause sehingga tidak akan mungkin hamil lagi atau karena pasangannya tidak tinggal di Kabupaten Pinrang (Susenas, 2018).



Grafik 6. Prevalensi pemakaian alat/cara KB perempuan berstatus kawin umur 15-49 tahun 2018

Grafik 6 menampilkan jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh WPK yang sedang KB. Jenis alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai di Kabupaten Pinrang adalah suntikan KB yaitu 47,56 persen WPK. Suntik KB dinilai sebagai alat kontrasepsi yang mudah penggunaannya karena disuntikkan hanya satu kali setiap tiga bulan atau setiap bulan.

Alat kontrasepsi kedua yang digemari adalah pil KB. pil KB juga termasuk aman dan mudah digunakan, harganya terjangkau, serta efektif mencegah kehamilan. Pil KB digunakan oleh 26,92 persen WPK. Sementara itu, sebanyak 11,49 persen WPK menggunakan susuk KB, 7,62 persen menggunakan IUD/AKDR/Spiral. Keempat jenis alat kontrasepsi tersebut termasuk kontrasepsi sementara sedangkan sterilisasi wanita/ MOW/ tubektomi, serta sterilisasi pria/ MOP/ Vasektomi merupakan jenis kontrasepsi permanen. Sementara itu, sebesar 4,89 persen WPK menggunakan alat/cara KB lainnya, yaitu antara lain kondom pria/karet KB, intravag/kondom wanita/diafragma, metode menyusui alami, dan pantang berkala/kalender. Pantang Berkala merupakan cara KB, tidak menggunakan alat apapun untuk dikonsumsi atau

dipakai pada alat reproduksi. PUS hanya perlu menggunakan kalender untuk menandai kapan masa subur dan tidak subur WPK sehingga PUS dapat melakukan hubungan ketika masa tidak subur untuk memperkecil resiko hamil. Metode ini efektif digunakan jika WPK memiliki siklus menstruasi yang teratur. PUS yang ingin menggunakan cara KB ini memerlukan pengetahuan yang cukup baik untuk memahami metode ini, sehingga dapat berhasil dengan baik.

MOP adalah Metode Operasi Laki-laki atau Vasektomi yang dilakukan dengan cara operasi pemotongan atau memutuskan saluran sperma pada laki-laki, sehingga pasangannya tidak akan mengalami kehamilan. PUS yang telah menggunakan MOP/Vasektomi dan MOW/Tubektomi akan secara permanen tidak memiliki keturunan lagi. Biasanya, jenis kontrasepsi ini dipilih oleh PUS yang telah merasa cukup dengan jumlah anak yang dimilikinya serta tidak berniat menambah anak lagi. Atau terpaksa dilakukan oleh PUS disebabkan penyakit tertentu yang menjangkit organ reproduksinya.

Pada umumnya, masyarakat familiar dengan istilah KB Suntik, Pil, Susuk, Spiral, Steril dan Kondom saja. Besarnya persentase pengguna suntik dan pil dikarenakan masyarakat takut karena efek samping yang ditimbulkan oleh susuk dan spiral, seperti jarum tertanam di dalam kulit, atau spiral terlepas didalam vagina. Selain itu, untuk kondom sendiri masyarakat meragukan keampuhannya, dikarenakan kurang efektif dalam mencegah kehamilan. Tahun 2018 sudah ada peningkatan dalam persentase masyarakat pengguna cara KB yang dahulu belum banyak dikenal masyarakat, yaitu pantang berkala/kalender. Sedangkan senggama terputus yang juga cara KB masih belum digunakan oleh PUS di Kabupaten Pinrang. Kedua cara KB ini tidak memiliki efek samping apapun dibandingkan penggunaan alat-alat KB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mayoritas pengguna cara ini adalah masyarakat yang memiliki pendidikan cukup tinggi, karena diperlukan pemahaman lebih untuk menerapkan sistem ini agar dapat berjalan dengan efektif. Tentunya peran pemerintah terutama kementerian kesehatan sangat diharapkan untuk

memberikan sosialisasi serta pemahaman mengenai jenis-jenis alat/cara KB serta cara penggunaan alat/cara KB secara benar dan efektif, agar tidak ada lagi alasan tidak ber-KB dikarenakan tidak mengetahui, tidak berhasil mencegah kehamilan ataupun takut efek samping menggunakan alat/cara KB tertentu.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

<https://pinrangkab.bps.go.id>



PENDIDIKAN



Melek Huruf

92,79%

Buta Huruf

7,21%



MELEK HURUF berarti memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti makna kalimat yang dibaca dan ditulis

SD

7 - 12 tahun



APS : 99,22

APM : 99,22

SMP

13 - 15 tahun



APS : 93,69

APM : 72,21

SMA

16 - 18 tahun



APS : 73,47

APM : 60,78

20.23%

Penduduk usia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah SD (tidak pernah bersekolah maupun tidak tamat SD)

<https://pinrangkab.bps.go.id>

BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan menjadi kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Penyebab mendasar terjadinya keterbelakangan adalah kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah di suatu wilayah akan menghambat peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan kultural secara lebih efektif (Sen, 1999). Oleh sebab itu, pembangunan manusia dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

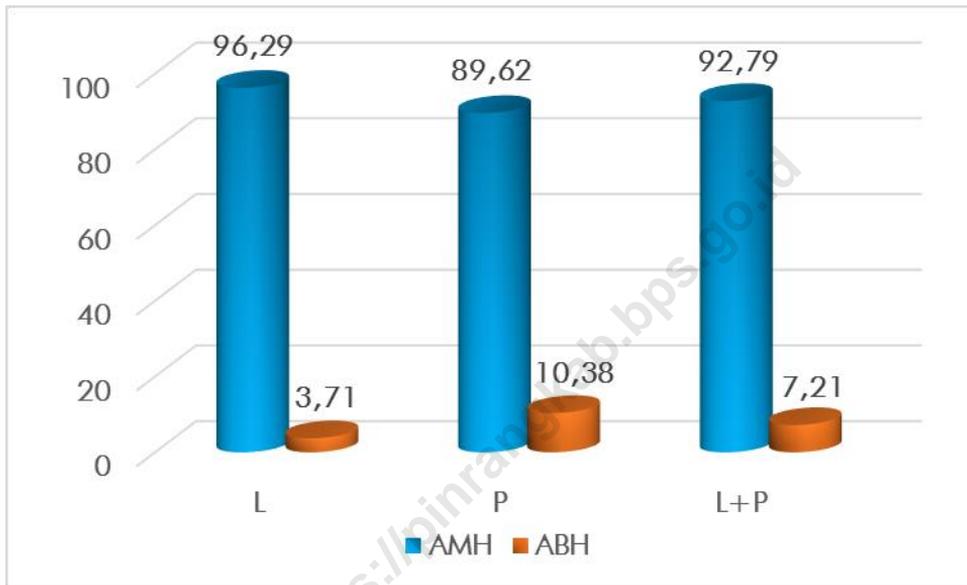
Menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, maka dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk meraih tujuan ini ditempuh dengan membentuk berbagai macam program pendidikan, seperti wajib belajar sembilan tahun, program kejar paket A, paket B, paket C, dan sebagainya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pada masa mendatang pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat terwujud.

4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Tujuan nasional pendidikan adalah memberantas buta huruf. Indikator keberhasilannya adalah menurunnya angka buta huruf atau dengan kata lain meningkatnya angka melek huruf. Definisi melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulis.

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan indikator dasar untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah karena membaca dan menulis merupakan dasar utama untuk memperluas pengetahuan. AMH juga menjadi tolok ukur keberhasilan program pengentasan buta huruf yang digalakkan pemerintah, baik pusat maupun daerah.



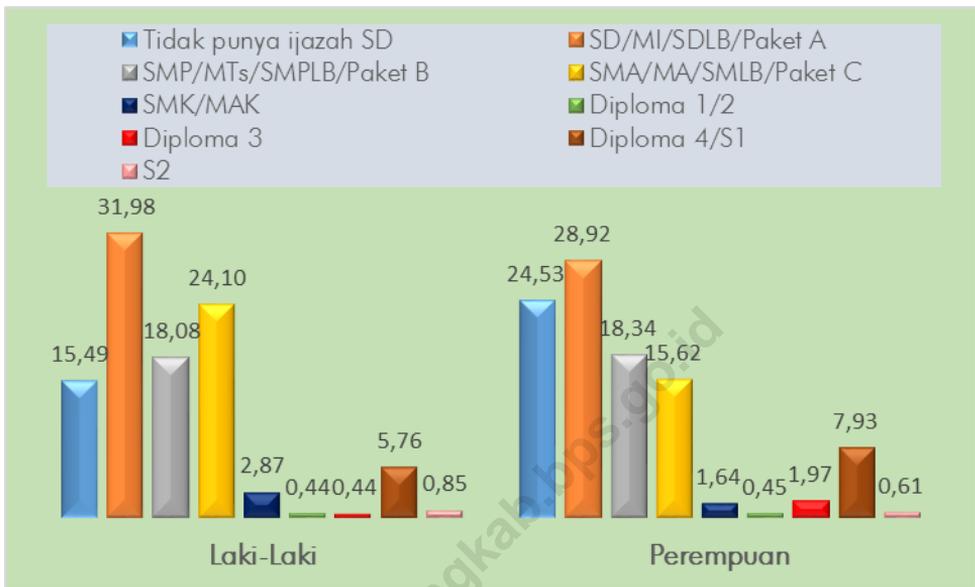
Grafik 7. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) menurut jenis kelamin di Kabupaten Pinrang, 2018

Secara umum AMH Kabupaten Pinrang tahun 2018 (92,79 persen) meningkat dibandingkan tahun 2017 (88,10 persen) sebesar 4,69 persen. Hal ini menunjukkan pemberantasan buta huruf mengalami peningkatan. Sementara itu, berdasarkan jenis kelaminnya, AMH laki-laki (96,29 persen) lebih besar daripada perempuan (89,62 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi laki-laki yang melek huruf lebih tinggi dibandingkan proporsi perempuan melek huruf.

4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin bagus

kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.



Grafik 8. Persentase ijazah/STTB yang dimiliki penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin, 2018

Berdasarkan Grafik 8 terlihat bahwa mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas memiliki ijazah tertinggi SD/MI/SDLB/Paket A. Diurutan kedua terbesar yaitu SMA/MA/SMLB/Paket C, sedangkan urutan ketiga adalah tidak memiliki ijazah SD. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Pinrang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Meskipun persentase ABH cukup rendah, akan tetapi kualitas pendidikan masih sangat kurang.

Tabel 4. Persentase ijazah/STTB yang dimiliki penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin, 2018

Ijazah Tertinggi	Laki-Laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah SD	15,49	24,53	20,23
SD/MI/SDLB/Paket A	31,98	28,92	30,38
SMP/MTs/SMPLB/Paket B	18,08	18,34	18,22
SMA/MA/SMLB/Paket C	24,10	15,62	19,65
SMK/MAK	2,87	1,64	2,22
Diploma 1/2	0,44	0,45	0,44
Diploma 3	0,44	1,97	1,24
Diploma 4/S1	5,76	7,93	6,90
S2	0,85	0,61	0,72
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2018

Menurut Tabel 4, persentase laki-laki yang bersekolah lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah SD untuk perempuan 24,53 persen sedangkan laki-laki 15,49 persen. Selain itu, laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SMK/MAK juga lebih besar dari perempuan karena laki-laki memiliki orientasi untuk cepat bekerja setelah lulus sekolah menengah.

4.3 Tingkat Partisipasi Sekolah

Indikator tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dalam publikasi ini indikator tingkat partisipasi sekolah diukur menggunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk yang bersekolah pada setiap kelompok usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Peningkatan APS menunjukkan meningkatnya penduduk yang bersekolah pada usia tertentu. Namun demikian meningkatkan APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk menikmati pendidikan.

Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
5-6	20,23	18,66	19,41
7-12	100,00	98,36	99,22
13-15	93,34	94,07	93,69
16-18	69,97	76,9	73,47

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang tahun 2018

APS kelompok umur 5-6 tahun sebesar 19,41 persen dan meningkat di kelompok umur 7-12 tahun menjadi 99,22 persen. Meskipun begitu, APS Kabupaten Pinrang tahun 2018 secara umum pada setiap jenis kelamin semakin menurun seiring semakin bertambahnya kelompok umur setelah kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan masyarakat untuk bersekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi pertimbangan tersebut, diantaranya biaya, akses, prioritas, budaya, dan faktor lain.

Pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Hal ini menunjukkan pada usia 7-18 tahun kesempatan perempuan lebih besar untuk mengakses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. APS Kabupaten Pinrang sebesar 93,69 persen pada kelompok usia 13-15 tahun dapat diartikan bahwa ada sekitar 93 sampai 94 orang dari penduduk berusia 13-15 tahun yang telah bersekolah pada jenjang pendidikan manapun.

Tabel 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kategori		Laki-Laki	Perempuan	L+P
(1)		(2)	(3)	(4)
APK	SD	111,53	106,80	109,28
	SMP	70,07	93,78	81,49
	SMA	85,63	72,87	79,17
APM	SD	100,00	98,36	99,22
	SMP	62,41	82,78	72,21
	SMA	58,28	63,22	60,78

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang Tahun 2018

Indikator lain untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menunjukkan gambaran jumlah penduduk yang bersekolah di tiap jenjang pendidikan pada kelompok umur sekolah yang sesuai. APK yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

APK Kabupaten Pinrang tahun 2018 jenjang SD sebesar 109,28 persen. Hal ini menunjukkan ada penduduk yang bersekolah di tingkat SD yang berusia kurang dari

7 tahun atau ada juga yang berusia diatas 12 tahun. Hal ini dapat disebabkan mereka mulai sekolah lebih awal sehingga belum berusia 7 tahun sudah bersekolah SD atau terlalu lambat mulai bersekolah sehingga pada usia 12 tahun belum menamatkan pendidikan SD atau dapat juga karena pernah mengulang kelas yang sama.

APK SMP sebesar 81,49 persen, menunjukkan masih terdapat sekitar 18,51 persen penduduk yang tamat SD tidak melanjutkan ke jenjang SMP. APK SMA sebesar 79,17 persen, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 20,83 persen penduduk yang tamat SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Hal ini dapat disebabkan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga belum bisa menampung secara keseluruhan siswa yang tamat SD yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP).

Indikator partisipasi sekolah yang menggambarkan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). APM dapat menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjangnya telah bersekolah pada jenjang tersebut, maka APM akan mencapai angka 100. Secara umum APM akan lebih rendah dari APK, karena APK mencakup penduduk berusia diluar rentang kelompok usia sekolah pada jenjang yang bersesuaian (lebih muda atau lebih tua).

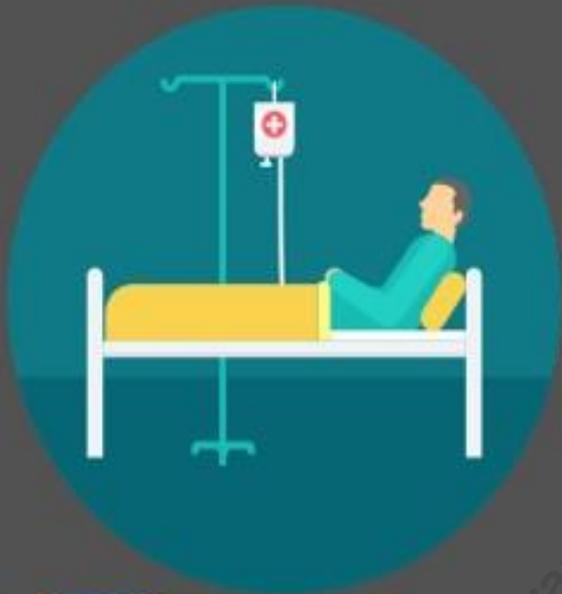
Secara umum APM Kabupaten Pinrang tahun 2018 semakin kecil seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan masih terdapat penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

APM Perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk semua jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk perempuan yang bersekolah tepat waktu lebih besar dibandingkan laki-laki.

APM Kabupaten Pinrang tahun 2018 pada jenjang SD sebesar 99,22 persen yang dapat diartikan bahwa 99,22 persen penduduk kelompok usia sekolah tingkat SD (7-12 tahun) bersekolah pada jenjang SD tepat waktu. APM SMP dan SMA Kabupaten Pinrang secara berturut-turut sebesar 72,21 dan 60,78 persen.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KESERHATAN



35,28%

Penduduk mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir.



33,34%

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berobat jalan ke **Puskesmas / Puskesmas**

42,34%

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berobat jalan ke **Praktik Dokter / Praktik Bidan.**



<https://pinrangkab.bps.go.id>



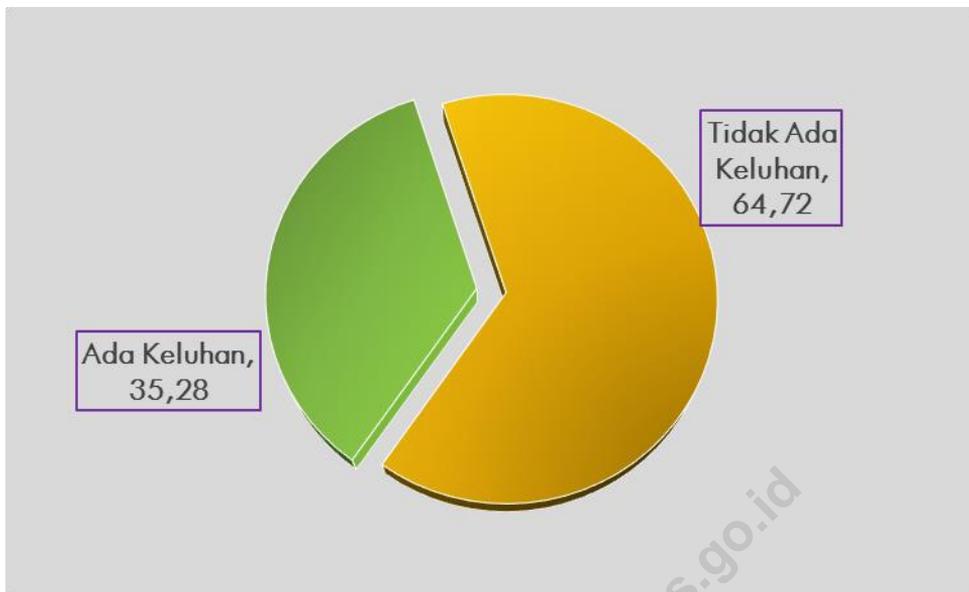
BAB V KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk melihat kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari jiwa dan raga serta kehidupan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Masyarakat yang semakin sehat berarti produktifitasnya semakin meningkat. Hal ini akan sangat mendukung proses dan dinamika pembangunan di suatu wilayah.

Guna meningkatkan kesehatan masyarakat, berbagai upaya dilakukan pemerintah baik melalui pembangunan sarana prasarana kesehatan maupun penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Upaya melalui pendidikan formal diantaranya adalah penerapan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Program-program pembangunan pemerintah di bidang kesehatan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga setiap penduduk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Hal ini dilakukan dengan pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, polindes, BKIA, posyandu, serta pemenuhan kebutuhan akan tenaga kesehatan dan obat-obatan.

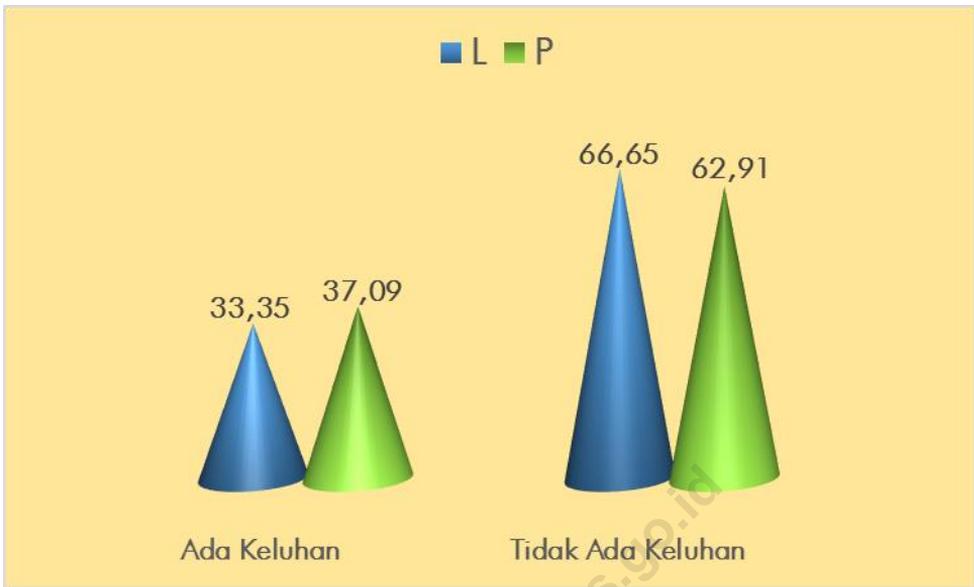
5.1 Angka Kesakitan / Morbiditas

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Konsep yang digunakan dalam Susenas yaitu seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada saat pencacahan orang yang bersangkutan sedang tidak kambuh penyakitnya. Semakin besar angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah semakin rendah.



Grafik 9. Persentase keluhan kesehatan yang diderita selama sebulan terakhir

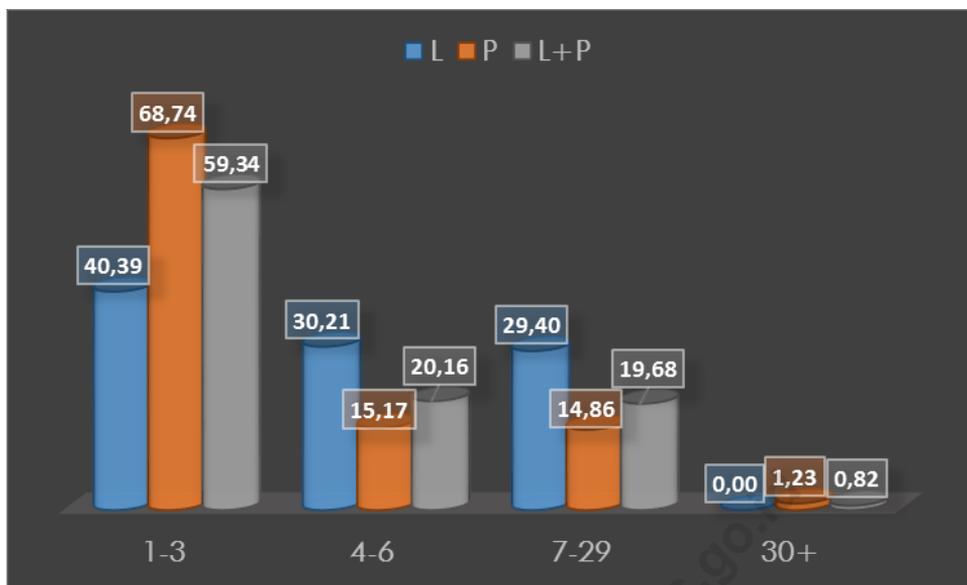
Grafik 9 menunjukkan 35,28 persen penduduk Kabupaten Pinrang mempunyai keluhan kesehatan. Sehingga angka kesakitan atau morbiditas untuk Kabupaten Pinrang tahun 2018 adalah 35,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat/derajat kesehatan masyarakat secara umum sudah cukup baik.



Grafik 10. Persentase keluhan kesehatan yang diderita penduduk selama sebulan terakhir menurut jenis kelamin, 2018

Grafik 10 menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut jenis kelamin pada tahun 2018. Perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan daripada laki-laki. Terlihat bahwa persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 37,09 persen sementara laki-laki sebesar 33,35 persen.

Berdasarkan Grafik 11, terlihat bahwa secara umum, keluhan kesehatan yang diderita oleh penduduk Pinrang kurang dari 4 hari baik untuk laki-laki maupun perempuan.



Grafik 11. Persentase penduduk yang menderita gangguan kesehatan sebulan yang lalu menurut lamanya hari gangguan kesehatan, jenis kelamin, 2018

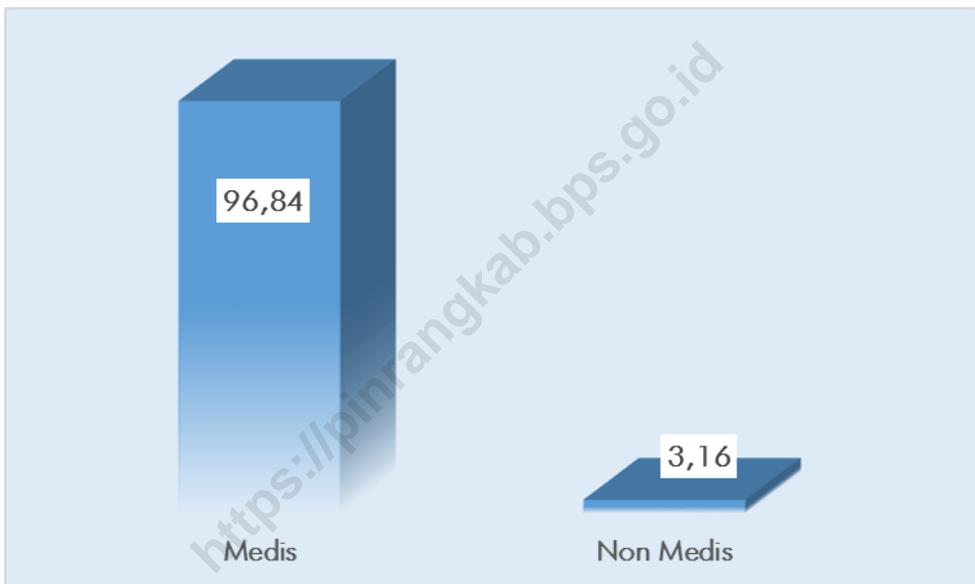
5.2 Penolong Persalinan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan barometer pelayanan kesehatan di suatu wilayah. AKI dan AKB erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, Indonesia menerapkan program *safe motherhood* dengan pilar utamanya adalah persalinan aman yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada pengumpulan data Susenas, diperoleh informasi tentang penolong kelahiran pertama dan penolong kelahiran terakhir. Penolong kelahiran pertama adalah orang yang membantu proses persalinan pertama kali. Sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah orang yang membantu proses persalinan hingga bayi dilahirkan. Penolong persalinan pertama dan terakhir dapat berbeda jika penolong kelahiran pertama menemukan masalah dalam persalinan yang tidak dapat ditangani sehingga membutuhkan bantuan untuk penanganan lebih lanjut dalam menangani proses persalinan. Oleh sebab itu, pada umumnya penolong terakhir

memiliki kemampuan dalam penanganan persalinan yang lebih baik dibandingkan penolong pertama.

Informasi mengenai penolong kelahiran diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kesehatan telah menjangkau masyarakat. Standar pelayanan minimal kesehatan 2010-2018 mensyaratkan 90 persen pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan.

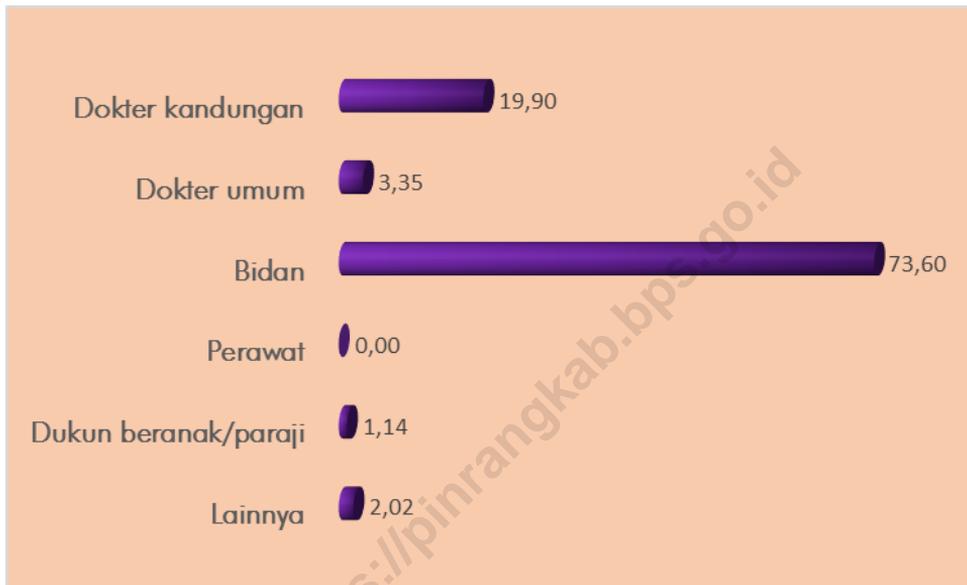


Grafik 12. Persentase balita menurut penolong kelahiran terakhir, 2018

Data tahun 2018 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang target pelayanan minimal kesehatan 90 persen sudah tercapai. Sebagian besar persalinan di Kabupaten Pinrang telah dilakukan oleh penolong kelahiran terakhir tenaga medis.

Persentase tertinggi penolong persalinan adalah Bidan yaitu 73,60 persen sebagai penolong kelahiran terakhir. Hal ini disebabkan adanya penugasan Bidan desa yang dapat menjangkau lokasi yang terpencil sekalipun. Yang harus menjadi perhatian adalah masih rendahnya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter karena jumlah dokter, terutama dokter spesialis kandungan di Kabupaten Pinrang

masih terbatas. Persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter kandungan sebagai penolong kelahiran terakhir adalah sebesar 19,90 persen. Perlu juga dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar penolong persalinannya adalah tenaga medis, karena masih terdapat penduduk yang penolong kelahiran terakhirnya adalah dukun beranak/paraji maupun lainnya selain tenaga medis.



Grafik 13. Persentase balita menurut tenaga penolong kelahiran terakhir, 2018

KETENAGAKERJAAN

59,14% Angkatan Kerja

BEKERJA
96,96%



PENGANGGURAN
3,04%

Pertanian, Kehutanan,
Perikanan

38,24%



23,35%



Pedagang Besar, Eceran,
Rumah Makan, Hotel

17,71% Jasa
Kemasyarakatan,
Sosial, Perorangan



12,30% Lainnya
(Tambang, Listrik, Gas,
Air, Bangunan, Angkutas,
Asuransi, dll)

Industri Pengolahan
8,40%



<https://pinrangkab.bps.go.id>

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran muncul sebagai akibat kesenjangan antara SDM dengan SDA dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibatnya pengangguran semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi melainkan juga di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Untuk mengatasi persoalan pengangguran, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sesuai pertumbuhan angkatan kerja dengan mendorong pertumbuhan industri yang banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas SDM agar memenuhi kebutuhan industri, serta mendorong masyarakat memiliki jiwa entrepreneurship sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

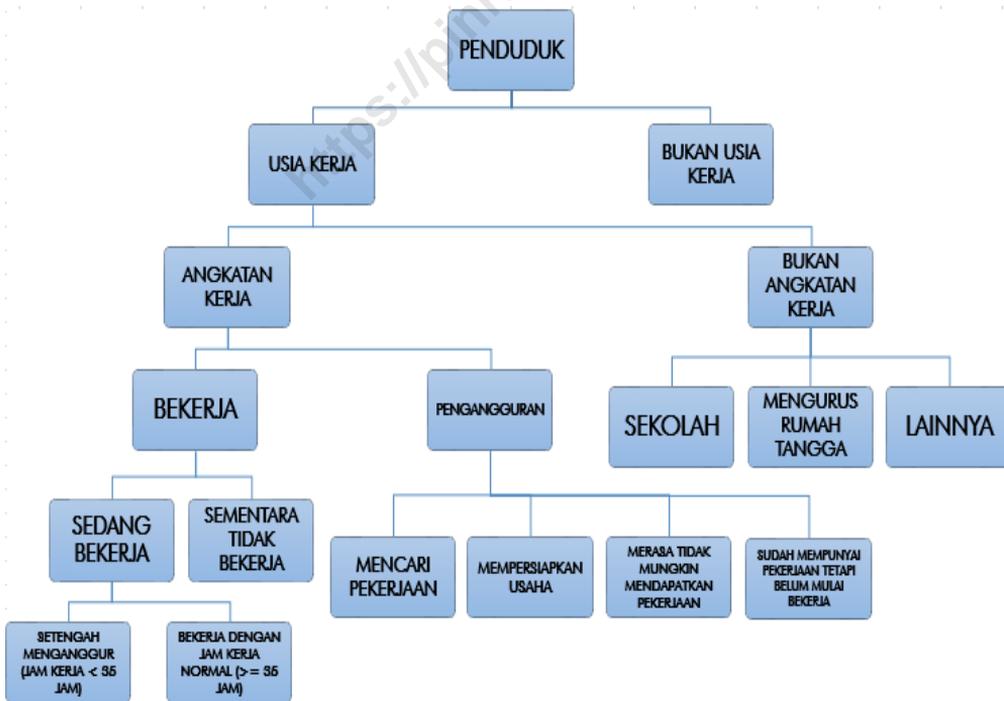
Data dan informasi ketenagakerjaan diperlukan oleh penentu kebijakan untuk menyusun strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Bab ini menjelaskan beberapa indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang dan bersumber dari bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2018.

6.1 Konsep Ketenagakerjaan

Konsep dalam bidang ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS membagi penduduk menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan

kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Termasuk dalam kelompok bekerja adalah penduduk usia kerja yang statusnya bekerja, dan sementara tidak bekerja (karena menunggu panen, sedang cuti atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya).

Menurut jam kerjanya, penduduk bekerja dibedakan menjadi penduduk yang bekerja sesuai jam kerja normal yaitu minimal 35 jam per minggu dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, atau disebut setengah menganggur. Penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan suatu usaha. Termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah kelompok usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya adalah bersekolah atau mengurus rumah tangga. Lebih jelasnya klasifikasi penduduk dalam konsep ketenagakerjaan dijelaskan dalam diagram berikut.



Grafik 14. Diagram Ketenagakerjaan, BPS

6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas). TPAK adalah salah satu ukuran yang dapat menjelaskan partisipasi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian.



Grafik 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Total, serta Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2018

Berdasarkan grafik 15, dari keseluruhan penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 sebanyak 59,14 persen adalah angkatan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 40,86 persen bukan termasuk angkatan kerja. Dari keseluruhan bukan angkatan kerja, terdapat sebanyak 69,85 persennya adalah penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sementara yang bersekolah terdapat sebanyak 18,84 persen dan lainnya sebanyak 11,21 persen. Lainnya disini termasuk yang berada dalam usia kerja tetapi tidak dapat bekerja karena cacat dsb.

TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2018 (Grafik 15) adalah 59,14 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 59 sampai 60 orang yang termasuk angkatan kerja. Angka ini meningkat 0,79 persen dibandingkan tahun 2017 (58,35 persen). Sementara itu, menurut jenis kelaminnya, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu 78,54 persen untuk laki-laki dan 41,55 persen untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki usia 15 tahun ke atas aktif secara ekonomi dengan bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sebaliknya, perempuan lebih banyak yang termasuk dalam bukan angkatan kerja karena menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan klasifikasi wilayahnya, TPAK di Kabupaten Pinrang tahun 2018 untuk daerah perkotaan lebih tinggi (60,07 persen) dibandingkan TPAK perdesaan (58,72 persen). Hal ini sejalan dengan kondisi tahun 2017, dimana TPAK wilayah perkotaan lebih tinggi dari wilayah perdesaan. TPAK untuk wilayah perkotaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 60,01 persen pada tahun 2017 menjadi 60,07 persen pada tahun 2018. Wilayah perdesaan juga mengalami peningkatan dari 57,65 persen pada tahun 2017 menjadi 58,72 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi).

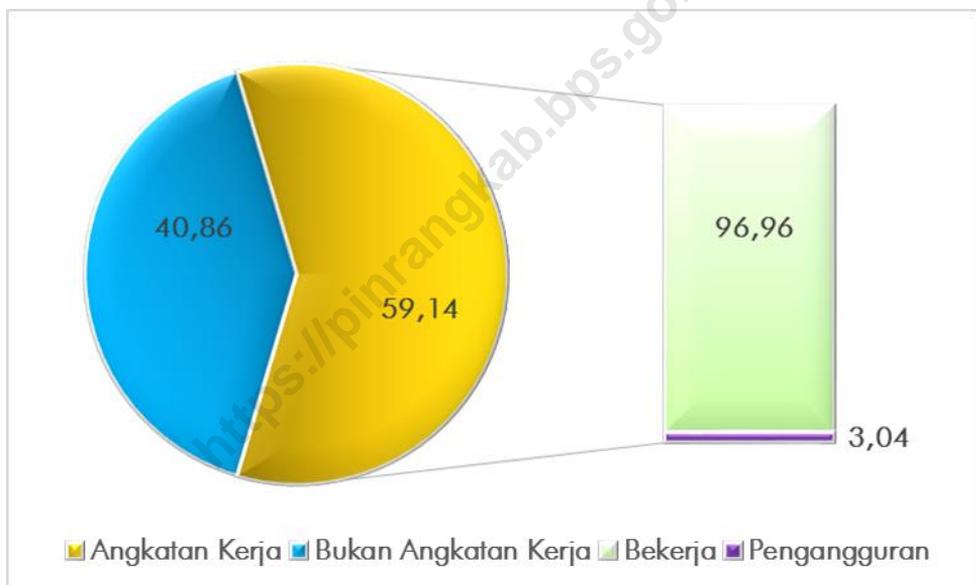
Tabel 7. TPAK Kabupaten Pinrang menurut wilayah dan jenis kelamin tahun 2017-2018

Klasifikasi		2017	2018
(1)		(2)	(3)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	80,26	78,54
	Perempuan	38,54	41,55
Wilayah	Perkotaan	60,01	60,07
	Perdesaan	57,65	58,72

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan tahun 2018

6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Grafik 16 menunjukkan dari seluruh penduduk Kabupaten Pinrang, sebesar 40,86 persen termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang berstatus sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Dari 59,14 persen angkatan kerja, sebesar 96,96 persen adalah penduduk yang bekerja sedangkan 3,04 persen merupakan pengangguran. Penduduk yang bekerja meliputi penduduk yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sementara itu, penduduk yang menganggur meliputi pengangguran pernah bekerja dan pengangguran tidak pernah bekerja.



Grafik 16. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, 2018

Angka 3,04 persen merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berarti bahwa pada tahun 2018 dari 100 penduduk 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Pinrang, sebanyak 3 sampai 4 orang merupakan pengangguran. Dengan kata lain, terdapat 3,04 persen angkatan kerja di Kabupaten Pinrang yang tidak terserap dipasar kerja. Angka ini menurun dibandingkan tahun

2017 sebesar 1,37 persen. Fenomena ini menyiratkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018.

Tabel 8. TPT Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Wilayah		Jenis Kelamin		TPT
	Perkotaan	Pedesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD ke bawah	0,17	0,18	0,17	0,18	0,35
SMP	0,33	0,00	0,14	0,19	0,33
SMA	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
SMK	0,23	0,21	0,00	0,44	0,44
Diploma I/II/III/Akademi	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24
Universitas	0,41	0,46	0,71	0,17	0,88
Jumlah	2,19	0,85	1,82	1,22	3,04

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan tahun 2018, diolah

Dari total 3,04 persen TPT Kabupaten Pinrang, sebesar 2,19 persen adalah TPT daerah perkotaan, dan 0,85 persen merupakan TPT daerah pedesaan. Tingginya TPT perkotaan dibandingkan pedesaan menunjukkan bahwa angkatan kerja di wilayah perkotaan Kabupaten Pinrang lebih banyak yang tidak terserap di pasar kerja dibandingkan angkatan kerja di pedesaan. Jika dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT terbesar adalah justru pada tamatan SMA di perkotaan yaitu 0,80 persen, selanjutnya TPT Universitas di perkotaan 0,41 persen, kemudian TPT SMK di Perkotaan 0,23 persen.

Sementara itu, Menurut jenis kelaminnya, dari total 3,04 persen TPT Kabupaten Pinrang, sebesar 1,82 persen TPT penduduk laki-laki dan 1,22 persen TPT penduduk

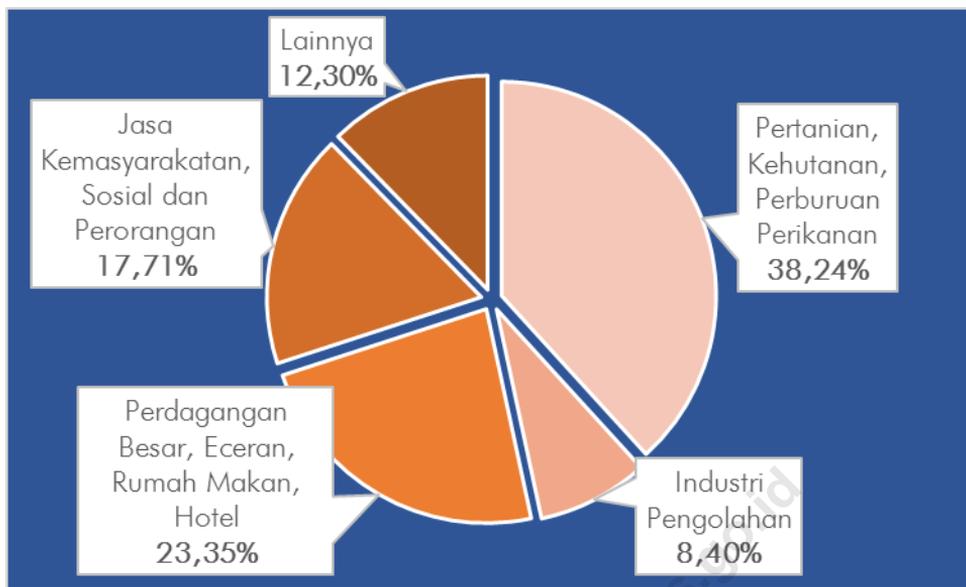
perempuan. TPT terbesar menurut jenis kelamin adalah TPT penduduk laki-laki tamatan SMA (0,80 persen), kedua penduduk laki-laki tamatan universitas (0,71 persen), ketiga penduduk perempuan tamatan SMK (0,44 persen), dan keempat penduduk perempuan tamatan Diploma I/II/III/Akademi (0,24 persen). Hal ini menandakan bahwa adanya kemungkinan tamatan SMA banyak yang menganggur dikarenakan sedang menunggu panggilan kerja atau menunggu pengumuman diterimanya kuliah.

Banyaknya penduduk laki-laki yang tidak bekerja disebabkan oleh banyak hal, baik karena tidak sesuai dengan bidangnya, terlalu jauh lokasinya, ketidaksesuaian dengan upah yang didapatkan, maupun karena memilih tidak bekerja dan menunggu penerimaan PNS saja. Di lain pihak, penduduk perempuan yang memilih menjadi pengangguran dikarenakan tanggung jawab menafkahi rumah tangga ada di tangan laki-laki, sehingga sebagian perempuan memutuskan menjadi ibu rumah tangga.

6.4 Bekerja

Konsep bekerja yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah bekerja minimal satu jam berturut-turut selama seminggu terakhir. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 adalah 152.277 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 5.814 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 146.463 jiwa.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut sektor utama yaitu pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya terlihat pada Grafik 17. Pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan pertanian lainnya, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Industri pengolahan meliputi pertambangan dan pengalihan, listrik, gas dan air, serta bangunan/konstruksi.



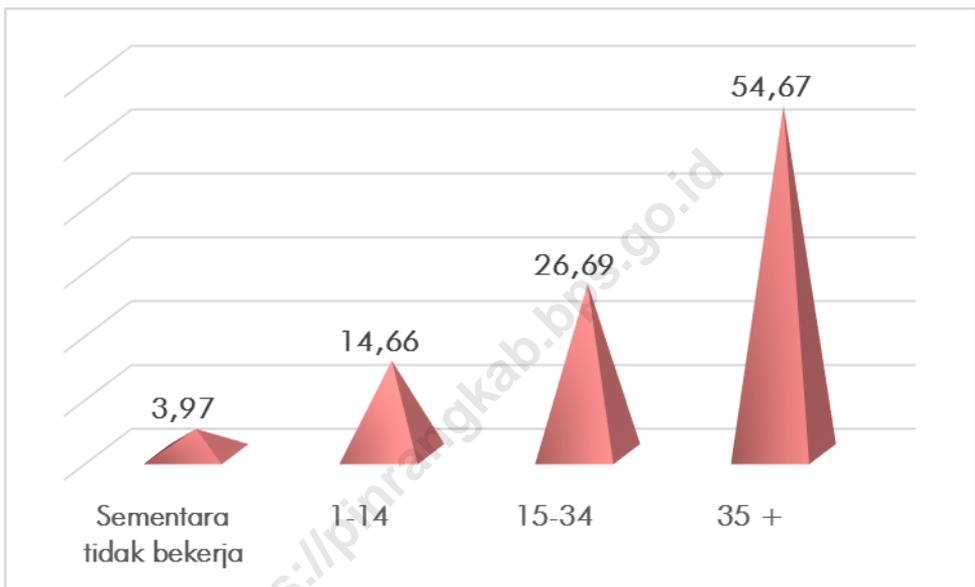
Grafik 17. Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha utama, 2018

Berdasarkan grafik 17, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan Perikanan yaitu sebesar 38,24 persen penduduk. Sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar kedua yaitu perdagangan besar, perdagangan eceran, rumah makan, dan hotel sebanyak 23,35 persen. Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 17,71 persen, sektor industri pengolahan sebesar 8,40 persen, dan sisanya sebesar 12,30 persen bekerja di sektor lainnya.

6.5 Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, dapat diperoleh indikator pengangguran terselubung atau setengah pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktifitasnya. Akibatnya, pendapatan

mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka, misalnya menambah balai latihan kerja.



Grafik 18. Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jumlah jam kerja selama seminggu, 2018

Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, diketahui bahwa 54,67 persen pekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 bekerja 35 jam atau lebih, sebanyak 26,69 persen bekerja antara 15 sampai 34 jam, 14,66 persen bekerja 1 sampai 14 jam, dan sisanya 3,97 persen sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Dengan demikian tingkat pengangguran terselubung (terlihat bekerja akan tetapi jam kerjanya sangat kecil yaitu kurang dari 35 jam per minggu) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 adalah 45,33 persen. Tingkat pengangguran terselubung yang cukup tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya pekerja keluarga dan pekerja bebas.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

PERUMAHAN



ATAP : SENG

95,12%

Dinding:

KAYU/PAPAN

42,48%

Lantai : KAYU/PAPAN 64,97%

67,35% Sumber Air Minum
BERSIH

Sumber Air Minum

LAYAK 36,05%



<https://pinrangkab.bps.go.id>

BAB VII

FASILITAS PERUMAHAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas serta tempat berlangsungnya proses sosialisasi bagi semua anggota rumah tangga. Keberadaan rumah dan fasilitasnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan anggota rumah tangga sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin baik rumah dan fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan penghuninya. Bab ini akan menyajikan data dari beberapa aspek mendasar yang merupakan komponen penyusun sebuah rumah yang berkaitan dengan struktur bangunan perumahan dan fasilitas perumahan tersebut.

7.1 Kualitas Rumah Tinggal

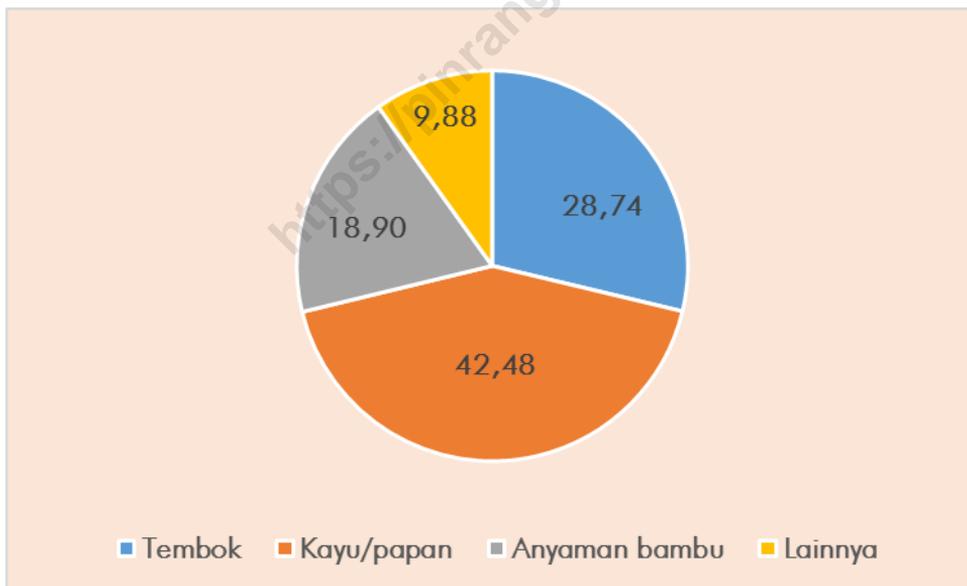
Rumah yang berkualitas adalah rumah yang memenuhi syarat tertentu dilihat dari beberapa aspek, seperti luas lantai per kapita, jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan. Rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantara persyaratan itu adalah dinding terluas terbuat dari tembok atau kayu, atap dari beton, genteng, sirap, seng ataupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

7.1.1 Jenis Dinding Rumah

Dalam publikasi ini dinding layak huni adalah dinding yang berbahan tembok dan kayu serta tidak lembab dan tidak tembus angin. Data tahun 2018 menunjukkan sebesar (71,22 persen) penduduk Kabupaten Pinrang sudah tinggal di dalam rumah dengan dinding yang layak. Mayoritas rumah penduduk Kabupaten Pinrang memiliki rumah dengan jenis dinding kayu/papan yaitu sebanyak 42,48 persen (Grafik 19).

Hal ini sesuai dengan rumah adat suku Bugis yang merupakan suku bangsa mayoritas di Kabupaten Pinrang.

Penggunaan kayu sebagai dinding rumah sebesar 42,48 persen sedikit meningkat sebesar 2,15 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 40,33 persen. Penduduk yang dinding rumahnya tembok sebesar 28,74 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2017 (33,19 persen) sebesar 4,45 persen. Bahan lain yang banyak digunakan sebagai dinding di Kabupaten Pinrang adalah anyaman bambu sebanyak 18,90 persen dan dinding lainnya termasuk seng sebesar 9,88 persen. Tidak ada penduduk yang bahan dinding rumahnya berupa plsteran anyaman bambu/kawat, batang kayu, dan batang bambu. Jenis dinding anyaman bambu dan seng biasanya digunakan oleh keluarga yang kondisi ekonominya kurang mampu karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli kedua jenis bahan material tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan dinding kayu dan tembok.



Grafik 19. Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas, 2018

7.1.2 Jenis Atap

Salah satu fungsi atap adalah untuk melindungi penghuni rumah dari cuaca panas dan hujan. Berdasarkan Grafik 20, seluruh rumah tangga di Kabupaten Pinrang

tinggal di dalam rumah yang menggunakan atap layak (beton, genteng, seng, sirap, asbes) sebesar 100,00 persen. Jenis atap seng paling banyak digunakan oleh penduduk Kabupaten Pinrang mencapai lebih dari 95 persen, karena atap jenis ini paling sesuai dengan konstruksi rumah panggung yang berdinding kayu dan juga harga material seng yang lebih terjangkau.



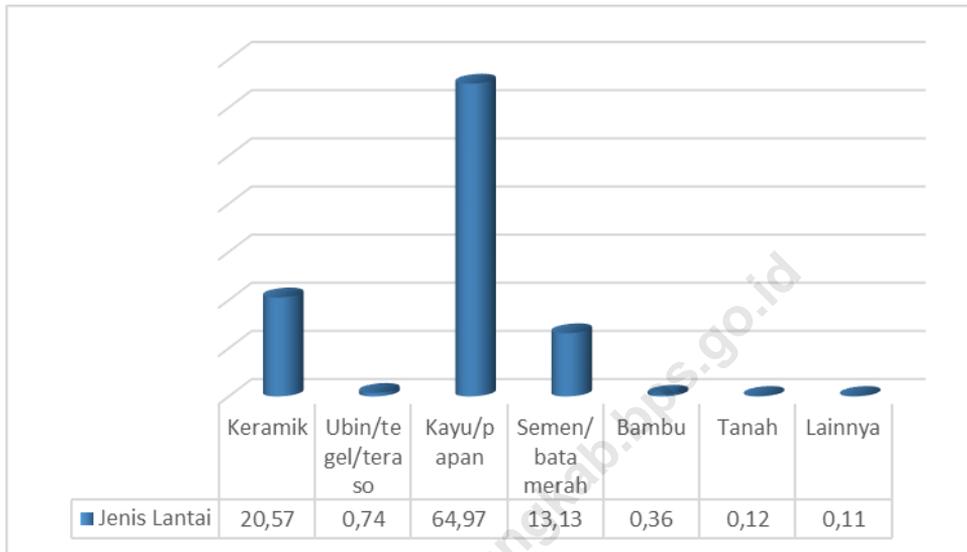
Grafik 20. Persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas, 2018

Persentase rumah tangga dengan jenis atap rumah terluas adalah seng yaitu sebesar 95,12 persen, kemudian setelah seng adalah asbes yang digunakan oleh 2,51 persen rumah tangga. Sebesar 2,18 persen rumah tangga menggunakan beton sebagai atap rumahnya. Masih ada juga rumah tangga yang menggunakan jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia sebagai atap rumah yaitu sebesar 0,19 persen.

7.1.3 Jenis dan Luas Lantai

Jenis lantai rumah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Pinrang memiliki jenis lantai terluas bukan tanah yaitu sebanyak 99,88 persen. Lantai bukan tanah terdiri dari keramik (20,57 persen), ubin/tegel/teraso (0,74 persen), kayu/papan (64,97 persen), semen/bata

merah (13,13 persen), bambu (0,36 persen), dan lantai lainnya (0,11 persen). Masih terdapat 0,12 persen rumah tangga yang tinggal di dalam rumah yang berlantaikan tanah.



Grafik 21. Persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas, 2018

Selain jenis lantai yang digunakan, luas lantai rumah per kapita menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen dan mempercepat proses penularan penyakit. Luas lantai per kapita merupakan indikator untuk menghitung rumah kumuh. Semakin besar luas lantai per kapita, semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga di wilayah tersebut. Luas lantai per kapita adalah luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Dengan asumsi, setiap rumah tangga terdiri dari 5 ART dan menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan, luas hunian minimum rumah adalah 36 m², maka luas perkapita adalah 7,2 m².

Tabel 9. Persentase rumah tangga menurut luas lantai rumah, tahun 2018

Luas Lantai Rumah (m ²)	Persentase
(1)	(2)
≤ 19	0,95
20 – 49	25,66
50 – 99	51,66
100 – 149	15,26
150+	6,47
Total	100,00

Sumber : Susenas, 2018

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang memiliki luas lantai rumah 50-99 m² yaitu sebesar 51,66 persen. Sebanyak 25,66 persen penduduk memiliki luas lantai rumah 20-49 m², sebanyak 15,26 persen penduduk memiliki luas lantai 100-149 m², dan 6,47 persen penduduk memiliki luas lantai lebih dari 150 m². Masih ada 0,95 persen penduduk yang memiliki luas lantai kurang dari 19 m².

Jika dilihat secara lebih detail, terdapat penduduk dengan luas lantai per kapita yang masih di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah (< 7,2 m²), yaitu sebesar 8,18 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena semakin kecil luas lantai per kapita, semakin sedikit pula ruang gerak yang ada dan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan di suatu rumah tangga. Namun demikian, rata-rata luas lantai rumah per kapita untuk Kabupaten Pinrang tergolong sudah cukup baik, yaitu > 10 m².

Tabel 10. Persentase rumah tangga menurut luas lantai rumah per kapita, tahun 2018

Luas Lantai Per Kapita (m ²)	Persentase
(1)	(2)
≤ 7,2	8,18
7,3-9,9	10,18
10+	81,64
Total	100,00

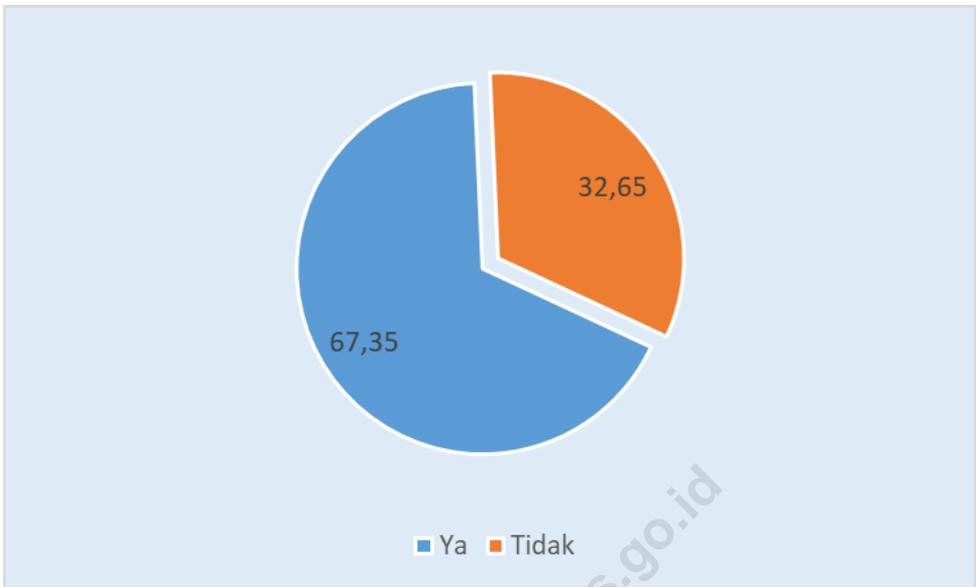
Sumber : Susenas, 2018

7.2 Fasilitas Rumah

Ketersediaan fasilitas rumah menentukan kenyamanan penghuninya, tingkat kesehatan, dan kemudahan dalam beraktivitas. Fasilitas yang penting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain tersedianya air minum bersih, sumber penerangan listrik, serta memiliki kloset sendiri dengan tangki septik/SPAL.

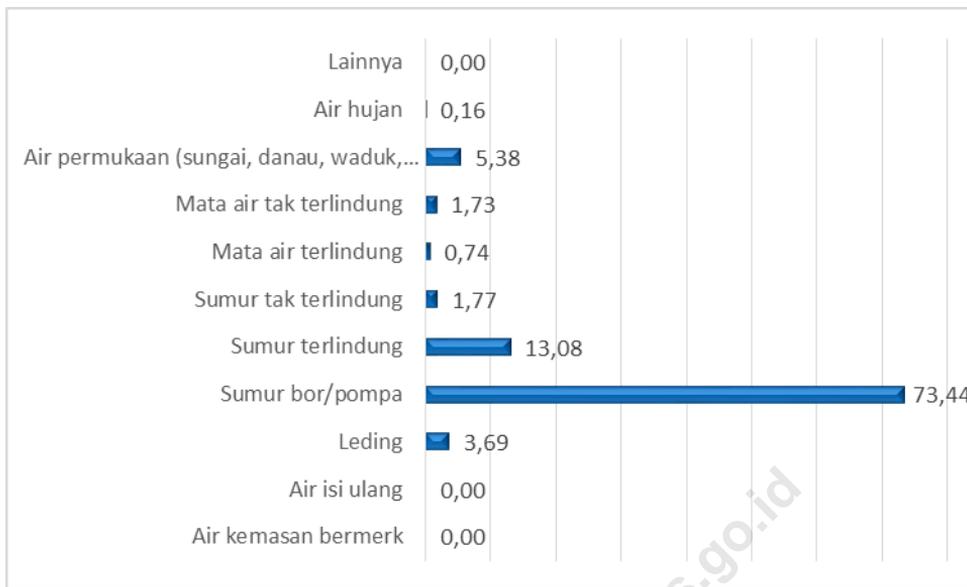
7.2.1 Air Minum Bersih

Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi sebagai syarat dari rumah sehat adalah air minum bersih. Sumber air minum yang termasuk kategori air bersih yaitu air ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus berjarak 10 meter atau lebih dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat agar dapat dikatakan layak. Pada Tahun 2018 sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang (67,35 persen) telah menggunakan sumber air minum bersih, angka ini menurun sekitar 29,55 persen dibanding tahun 2017. Sementara itu 32,65 persen tidak minum air bersih.



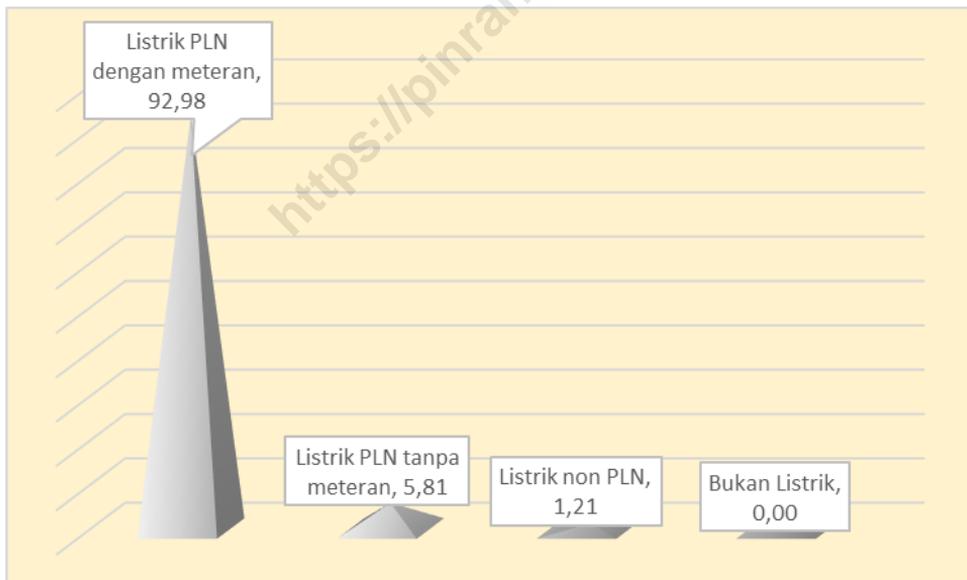
Grafik 22. Persentase rumah tangga menurut penggunaan air minum, 2018

Kualitas air bersih dapat dilihat dari sumbernya. Sumber air minum menurut derajat kualitasnya berturut-turut adalah air kemasan/isi ulang, bor/pompa, leding, sumur (sumur terlindung dan sumur tak terlindung), mata air terlindung, air sungai dan dan air hujan. Untuk rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung harus memperhatikan jarak, dari tempat pembuangan akhir tinja. Jarak yang terbaik adalah minimal 10 meter dari tempat pembuangan tinja. Persentase terbesar sumber air untuk minum yang dipakai oleh penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 adalah air dari sumur bor/pompa sebesar 44,09 persen dan air isi ulang sebesar 31,49 persen.



Grafik 23. Persentase rumah tangga menurut sumber air untuk memasak, 2018

7.2.2 Sumber Penerangan Listrik



Grafik 24. Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan listrik, 2018

Sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan diantaranya listrik (PLN dan non PLN), petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lainnya. Listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu

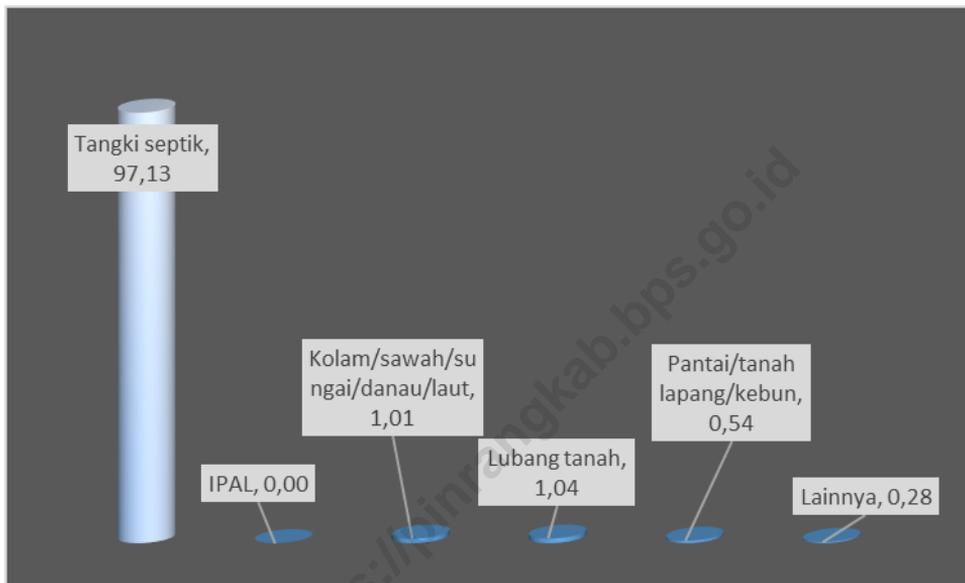
sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Sumber penerangan di Kabupaten Pinrang terdiri atas 92,98 persen listrik PLN dengan meteran; 5,81 persen listrik PLN tanpa meteran 1,21 persen listrik non PLN dan tidak ada penduduk yang sumber penerangannya bukan listrik. Listrik non PLN umumnya digunakan oleh rumah tangga di daerah yang memiliki akses terbatas seperti beberapa desa di Kecamatan Lembang. Listrik non PLN umumnya bersumber dari swadaya masyarakat atau bantuan lembaga internasional. Sumber tenaga listrik non PLN di Kabupaten Pinrang adalah kincir air. Beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang yang tergolong daerah sulit memang belum terjangkau listrik. Sehingga untuk kehidupannya mereka masih menggunakan penerangan tradisional.

7.2.3 Tempat Pembuangan Tinja

Sistem pembuangan tinja erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah tangga. Sistem pembuangan tinja sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal rumah tangga tersebut. Kriteria akses terhadap sanitasi layak adalah penggunaan fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) milik sendiri atau bersama, menggunakan kloset dan tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki septik atau sarana pembuangan air limbah (SPAL).

Berdasarkan data Susenas tahun 2018, 89,45 persen penduduk Kabupaten Pinrang memiliki fasilitas BAB, sedangkan sisanya 10,54 persen tidak memiliki fasilitas BAB. Dari 89,45 persen tersebut, terdapat tiga jenis kloset yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Pinrang, yaitu kloset leher angsa, plengsengan tanpa tutup serta cemplung/cubluk. Kloset Leher Angsa merupakan kloset leher lubang closet berbentuk lengkungan, dengan demikian akan terisi air, gunanya sebagai sumbat sehingga dapat mencegah bau busuk serta masuknya binatang-binatang kecil. Kloset model ini adalah model yang terbaik yang dianjurkan dalam kesehatan lingkungan. Kloset leher angsa digunakan oleh mayoritas rumah tangga (99,21 persen).

Berdasarkan data Susenas 2018, penggunaan kloset leher angsa sebesar 99,21 persen, kloset plengsengan tanpa tutup 0,33 persen, dan sisanya sebesar 0,46 persen rumah tangga yang menggunakan cemplung/cubluk. Dengan kata lain penggunaan fasilitas pembuangan air besar di Kabupaten Pinrang Tahun 2018 sebagian besar menggunakan jenis kloset yang sehat.



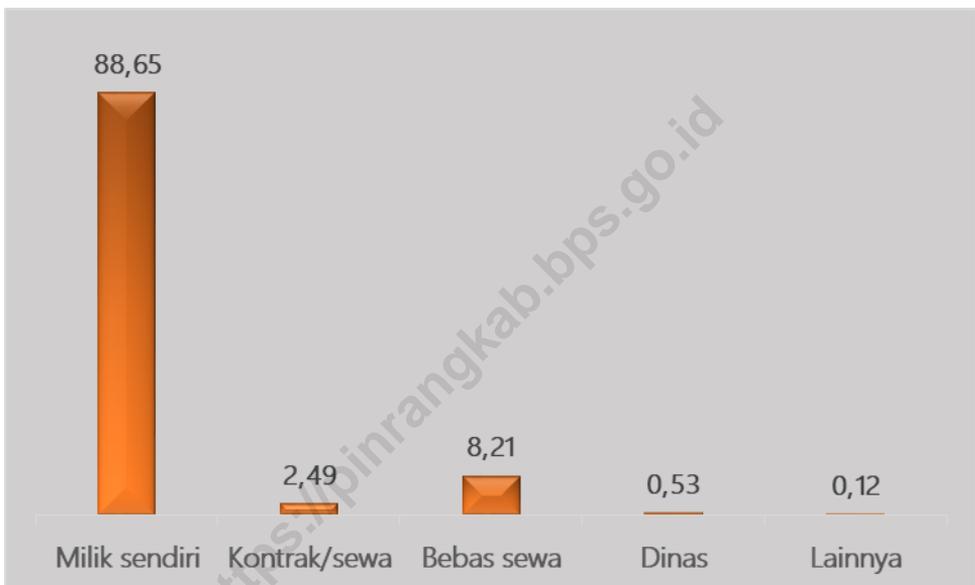
Grafik 25. Persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat pembuangan akhir tinja, 2018

Tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan sebagian besar rumah tangga (97,13 persen) telah menggunakan tangki dengan dasar semen. Sementara itu, 2,87 persen rumah tangga masih belum memiliki pembuangan akhir tinja yang layak. Dampak serius membuang kotoran yang tidak sehat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.

7.3 Status Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal.

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat mempengaruhi status kepemilikan tempat tinggal. Status kepemilikan rumah menurut data susenas dikelompokkan menjadi lima macam yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dinas dan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Grafik 26. Persentase rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal, 2018

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang telah memiliki rumah dengan status milik sendiri yaitu sebanyak 88,65 persen. Untuk status kepemilikan rumah tinggal kontrak/sewa, sebanyak 2,49 persen. 8,21 persen rumah tangga menempati rumah tinggal bebas sewa milik orang lain, 0,53 persen rumah tangga menempati rumah dengan status dinas, dan sisanya sebesar 0,12 persen rumah tangga status kepemilikan rumahnya adalah lainnya.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

PENGELUARAN RUMAH TANGGA



Konsumsi Makanan 52,11%

**Konsumsi Non Makanan
47,89%**



<https://pinrangkab.bps.go.id>

BAB VIII

KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah strategis dan sistemik yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan program perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan bagian dari “Nawa Cita” atau Sembilan agenda perubahan yang dicanangkan pemerintah yaitu mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar warga miskin dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin. Selain itu berbagai program pembangunan juga diluncurkan untuk penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Penanganan kemiskinan perlu didukung oleh data yang berkualitas. Hingga saat ini BPS bertugas untuk mengumpulkan data kemiskinan makro dan mikro. Data kemiskinan makro adalah data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara data kemiskinan mikro adalah data yang menunjukkan nama dan alamat rumah tangga miskin. Data kemiskinan mikro digunakan untuk menentukan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, data kemiskinan makro lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menentukan target dalam perencanaan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, serta membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah.

Pengukuran kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Pada publikasi ini akan ditampilkan hasil penghitungan kemiskinan makro yang dihasilkan dari data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

8.1 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Menurut pendekatan kebutuhan dasar, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.



Grafik 27. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2015-2018

Persentase konsumsi makanan terhadap total pengeluaran pada periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan meningkat namun menurun pada tahun 2018. Sebaliknya, untuk persentase konsumsi non makanan cenderung menurun dari tahun 2015 ke 2017 namun meningkat pada tahun 2018. Kondisi tahun 2018 ini menunjukkan ada banyak perubahan pola konsumsi dari komoditi non makanan ke makanan. Akan tetapi persentase konsumsi non makanan yang masih cukup besar merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan.

Pada tahun 2018, rata-rata konsumsi per kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang adalah Rp 904.833,-. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017, yaitu Rp 855.502,-. Nilai konsumsi per kapita sebulan pada tahun 2018 tersebut lebih kecil daripada rata-rata konsumsi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp 1.016.244,-.

Jika dihitung berdasarkan persentase pada Grafik 27, maka rata-rata konsumsi makanan per-kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 471.504,- atau 52,11 persen dari total pengeluaran. Mengalami penurunan 2,65 persen dibandingkan tahun 2017. Sebaliknya, persentase pengeluaran non makanan menunjukkan peningkatan dari 45,24 persen pada tahun 2017 menjadi 47,89 persen pada tahun 2018. Jika dirata-ratakan, pengeluaran per-kapita non-makanan menjadi sebesar Rp. 433.330,- dari Rp. 387.029,- pada tahun 2017 dari total pengeluaran rumah tangga.

Tabel 11. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (rupiah) menurut kelompok barang, Maret 2018

Kelompok Barang		Rata-Rata Pengeluaran Sebulan (Rp)
(1)		(2)
A.	MAKANAN	
1	Padi-Padian	68.317
2	Umbi-Umbian	2.704

3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	70.600
4	Daging	9.268
5	Telur dan Susu	23.637
6	Sayur-Sayuran	21.929
7	Kacang-Kacangan	5.909
8	Buah-Buahan	30.921
9	Minyak dan Kelapa	10.339
10	Bahan Minuman	13.240
11	Bumbu-Bumbuan	7.194
12	Konsumsi Lainnya	9.604
13	Makanan dan Minuman Jadi	141.072
14	Rokok	56.770
Jumlah Makanan		471.504
B.	BUKAN MAKANAN	
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	193.663
2	Aneka Barang dan Jasa	78.770
3	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	32.000
4	Barang Tahan Lama	61.678
5	Pajak Pungutan, dan Asuransi	27.961
6	Keperluan Pesta dan Upacara	39.257
Jumlah Bukan Makanan		433.330
Jumlah		904.833

Sumber : Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan menurut Kabupaten/Kota Maret, 2018

8.2 Penduduk Miskin

Menurut Bappenas, miskin adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain:

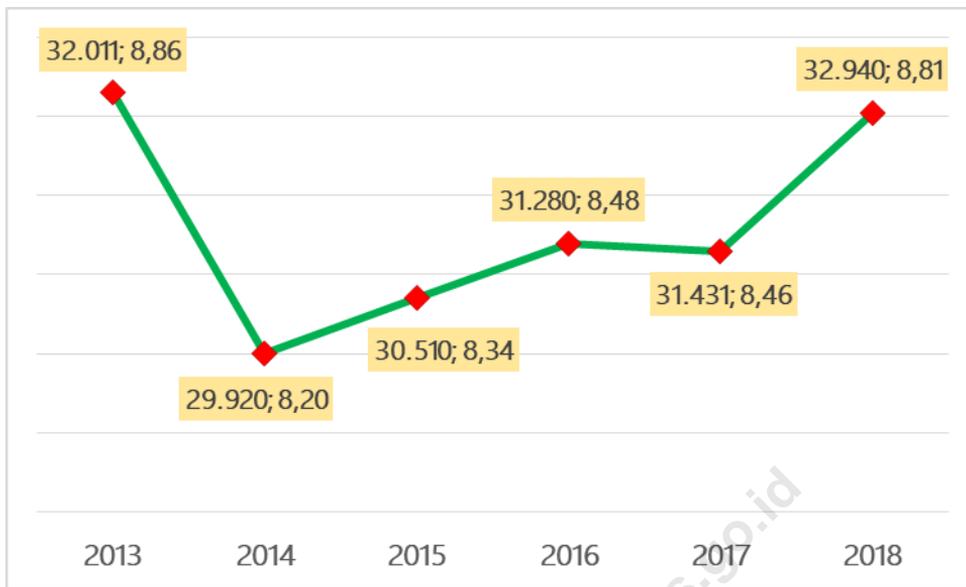
terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Definisi tersebut diterjemahkan dalam konsep kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS sebagai rumah tangga yang pengeluaran perkapita sebulan lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan (GK).

Tabel 12. Garis kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2013-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)
2013	221.717
2014	228.150
2015	234.897
2016	250.163
2017	256.054
2018	280.746

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota

Garis kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2018 adalah Rp 280.746,-. Terlihat dari Tabel 10 garis kemiskinan cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditi makanan maupun non makanan di Kabupaten Pinrang sebagai dampak adanya fluktuasi harga BBM, kenaikan harga komoditi dunia, penurunan nilai tukar yang berdampak pada harga barang impor dan sebagainya.



Grafik 28. Persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pinrang tahun 2013-2018

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dan peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2018. Selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Sementara itu, pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen yaitu dari 8,46 persen atau 31.431 jiwa menjadi 8,81 persen atau 32.940 jiwa.

Kenaikan garis kemiskinan pada umumnya akan diikuti peningkatan persentase penduduk miskin terutama jika kenaikan garis kemiskinan terjadi akibat kenaikan harga yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Kondisi pada tahun 2013 hingga 2018 menunjukkan bahwa gejala ekonomi yang terjadi berimbas pada kenaikan kemiskinan karena tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kenaikan garis kemiskinan pada tahun 2018 (tabel 10) mengakibatkan persentase penduduk miskin semakin meningkat. Fenomena ini menunjukkan adanya kenaikan daya beli masyarakat tanpa diimbangi oleh kenaikan pendapatan sehingga persentase penduduk miskin meningkat.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 13. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2013-2018

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2013	1,16	0,22
2014	1,00	0,17
2015	1,66	0,52
2016	1,30	0,36
2017	1,62	0,44
2018	1,16	0,26

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota

Pada periode 2017-2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,62 pada tahun 2017 menjadi 1,16 pada tahun 2018. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2018 sebesar 0,26, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,44. Menurunnya nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

<https://pinrangkab.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, UNFPA. 2015. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2020. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2018. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2018. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2018. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2018. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sulawesi Selatan Per Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://pinrangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18, Pinrang, Sulawesi Selatan

Telp./Fax : 0421 – 921021

E-mail : bps7315@bps.go.id

Homepage : pinrangkab.bps.go.id